

Hukum

Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka

Frédéric Bastiat

HUKUM

HUKUM

Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka

Frédéric Bastiat

Pengantar

Arianto A. Patunru

Tom G. Palmer

Richard M. Ebeling

Freedom Institute

AkademiMerdeka.org

HUKUM

Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka

Frédéric Bastiat

Judul asli The Law

The Law pertama kali ditulis dalam bahasa Prancis. Edisi bahasa Indonesia ini adalah terjemahan dari versi Inggrisnya yang diterbitkan pada 1998 oleh Foundation for Economic Education (FEE). Penerjemahan ini atas dasar izin tertulis dari FEE.

ISBN 978-979-19466-3-6

Penerjemah Zaim Rofiqi
Penyunting Sugianto Tandra
Sampul dan tataletak Sijo Sudarsono

Diterbitkan atas kerja sama
Freedom Institute
Jl. Proklamasi No. 41, Menteng - Jakarta 10320
Tel: (021) 31909226 Fax: (021) 31909227
Website: http://www.freedom-institute.org
E-mail: office[at]freedom-institute.org
dan
AkademiMerdeka.org
c/o: Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS)
K3 Taman Tunku, bukit Tunku
50480 Kuala Lumpur, Malaysia
www.IDEAS.org.my

Cetakan pertama Juni 2010

DAFTAR ISI

PENGANTAR

TENTANG BASTIAT DAN PELURUSAN LOGIKA

Arianto A. Patunru

Terus terang saya baru mengenal nama Frédéric Bastiat, ekonom klasik Prancis kelahiran Bayonne tahun 1801, setelah membaca buku Henry Hazlitt yang sangat terkenal, "Ekonomi dalam Satu Pelajaran".[1] Buku itu sangat berkesan, sehingga saya mulai memburu karya-karya Bastiat sendiri.

Hazlitt mengakui, inspirasi utama bukunya yang pertama kali terbit tahun 1946 itu adalah Frédéric Bastiat, di samping Philip Wicksteed dan Ludwig von Mises. Bastiat, menurut Hazlitt telah mengajarkannya menulis argumen dengan efektif dengan bahasa yang mudah dimengerti semua orang. Sebuah karya pamflet Bastiat, "Apa yang Terlihat dan Apa yang Tak Terlihat"[2] disebut Hazlitt sebagai dasar utama argumen-argumennya di dalam buku tersebut. Bahkan ia menyebut bukunya sebagai 'modernisasi, ekstensi, dan generalisasi' dari pamflet tersebut.

Saya kira Hazlitt tidak berlebihan. R.J. Deachman pada tahun 1934 dalam pengantarnya untuk buku "Salah Kaprah

---

1 *Economics in One Lesson*, New York: Harper and Brothers, 1946.

2 *What is Seen and What is Not Seen*, dimuat di dalam *Economic Fallacie*s, Florida:Simon Publications, 1934.

Ekonomi"3 karangan Bastiat mengatakan bahwa belum ada ekonom yang bisa menandingi Bastiat dalam berargumentasi dengan bahasa yang jernih. Lebih spesifik, Deachman mengatakan tidak ada yang bisa "menggambarkan kutukan nasionalisme yang sempit sejelas Bastiat". Memang, proteksionisme serba anti asing adalah salah satu sasaran serangan Bastiat selama karir kepenulisannya.

Tentu saja sejak pengantar Deachman dan buku Hazlitt, telah lahir dan bermunculan penulis-penulis handal yang mampu berbicara ekonomi teknis dengan gaya ringan namun jelas seperti Bastiat. Kita mengenal John M. Keynes, Milton Friedman, dan dewasa ini Paul Krugman, Jeffrey Sachs atau Greg Mankiw. Untuk isu-isu di Indonesia kita kenal Faisal Basri dan M. Chatib Basri, misalnya. Namun, Bastiat adalah pendobrak pada masanya. Banyak kita berutang padanya. Dengan sarkasme yang tajam tapi efisien, ia menghantam logika-logika sesat di jamannya. Misalnya, untuk menyindir para merkantilis (yaitu mereka yang hanya mau ekspor dan anti impor) ia 'menganjurkan' agar kapal yang membawa produk ekspor ditenggelamkan saja sebelum kembali dengan membawa barang impor. Atau ketika ia menyindir produsen lokal di Prancis yang melulu meminta proteksi dari saingan asing. Ia menulis parodi petisi para pembuat lilin (disertakan dalam buku ini sebagai bonus). Isinya, supaya negara melindungi industri lilin nasional dengan cara melindungi mereka dari saingan utama lilin: matahari.

Bastiat tak pernah bosan mengingatkan bahwa yang paling penting dari sebuah keputusan atau kebijakan adalah "akibatnya yang tak terlihat, bukan yang terlihat". Ketika seorang anak

---

3 *Economic Fallacie*s, Florida:Simon Publications, 1934. Buku ini juga sebelumnya pernah terbit dengan judul *Economic Sophisms*.

kecil melempar kaca jendela toko milik ayahnya, akibat yang terlihat adalah pemilik toko, sang ayah, terpaksa memanggil tukang kaca. Tukang kaca datang, mengganti kaca, dibayar, katakanlah Rp 100.000. Selesai. Namun yang tak terlihat adalah kesempatan pemilik toko untuk membelanjakan uang tadi buat keperluan lain. Karena membayar kaca ganti, ia urung membeli barang lain, misalnya sepatu. Dari perspektif industri, kita katakan industri kaca mendapatkan Rp 100.000. Itu yang terlihat. Tapi yang tak terlihat, industri sepatu kehilangan Rp 100.000. Dengan begitu, pecah atau tidak, kaca itu tak memberi nilai tambah kepada perekonomian keseluruhan. Tapi juga tidak mengurangi. Benarkah begitu?

Bastiat menjelaskan, ada sesuatu yang lain sedang terjadi: di rumah tangga si pemilik toko. Jika kaca itu tidak pecah, ia akan bisa menikmati sepasang sepatu baru dan jendela berkaca. Jika kaca pecah, ia kehilangan kesempatan membeli sepatu baru, sementara kepuasannya atas jendela berkaca tidak berkurang atau bertambah. Berdasarkan kedua sisi ini, industri dan rumah tangga, kita pun mafhum, bahwa perekonomian dirugikan oleh kaca yang pecah. Inilah salah satu argumen Bastiat yang sangat terkenal yang meluluhlantakkan apa yang disebut "sesat logika kaca-pecah", *the broken window fallacy*.[4] Tentu dewasa ini di kelas-kelas fakultas ekonomi kita mewajibkan pemahaman tentang *opportunity costs* atau nilai manfaat yang terkorbankan. Kita belajar dan mengajarkannya dengan matematika dan kurva serba kaku. Bastiat hampir 200 tahun lalu, melalui kisah sederhana, mengingatkan kita bahayanya melupakan konsep itu. Dengan alat berpikir yang sama, Bastiat menyerang salah paham akan pajak, penciptaan lapangan kerja yang dipaksakan, upah minimum, dan lain-lain.

---

4 "*The Broken Pane*" dalam *Economic Fallacies*, 1934.

Di dalam buku ini, Bastiat menelaah hukum dengan kacamata seorang ekonom. Karenanya, ia mendefinisikan hukum sebagai “organisasi dari hak individu secara kolektif untuk membela diri secara sah”. Posisi Bastiat jelas. Karena insting manusia adalah merampas, maka hukum, dilaksanakan oleh pemerintah, perlu ada untuk melindungi hak milik serta menghindari perampasan. Hukum menjadi senjata melawan ketamakan. Masalahnya, yang menulis hukum manusia juga. Apalagi dengan terkonsentrasi pada orang-orang tertentu saja, hukum menjadi rentan atas penyalahgunaan. Ketika penyalahgunaan dilakukan secara kolektif dengan dalih hukum, tejadilah ‘perampasan sah’ (*legal plunder*). Hukum pun menjadi senjata *bagi* ketamakan. Selama ketamakan dan filantropi palsu tidak dapat dibuat disinsentif-nya, maka penyelewengan hukum niscaya terus terjadi. Dan negara menjadi sarana perampasan.

Bastiat membangun struktur argumennya dalam buku in dengan fokus pada tiga hak asasi manusia: hidup/individualitas, kebebasan, hak milik. Ketiganya disebut Bastiat sebagai “anugerah Tuhan”. Dalam keseharian ketiganya menghadapi musuhnya masing-masing: perbudakan, penindasan, dan perampasan. Hukum dibuat untuk menghindari ketiga hal terakhir menguasai ketiga hal yang pertama. Namun hukum juga bisa *mengakibatkan* sebaliknya. Maka salah satu hal yang perlu dilakukan sebelum menganalisis hukum adalah melepaskan anggapan bahwa hukum *pasti* adil. Sekali lagi, ia buatan sekelompok manusia, jadi kemungkinan bahwa ia justru *bertentangan* dengan keadilan tidak boleh dinafikan. Hukum baginya, seharusnya dipandang secara negatif (untuk mencegah ketidakadilan), alih-alih positif (untuk mengorganisasikan keadilan).

Agar hukum bisa berfungsi sebagaimana mestinya, Bas-

tiat menganjurkan pendekatan ekonomi sederhana: buat biaya perampasan lebih besar daripada manfaatnya. Salah satu caranya adalah jadikan ia lebih menyakitkan dan lebih berbahaya ketimbang bekerja secara sah. Sekarang prinsip sederhana ini memang diadopsi cukup luas dalam subdisiplin ilmu ekonomi dan hukum. Lihat misalnya karya-karya Gary S. Becker dan Richard Posner di University of Chicago. Ada dua komponen insentif-disinsentif dalam fungsi kepuasan calon kriminal: probabilita tertangkap serta besarnya hukuman. Kedua faktor ini harusnya masuk dalam pertimbangan calon kriminal ketika akan melakukan aksinya. Karena itu, hukum perlu mempertimbangkan bagaiman kombinasi optimal keduanya agar menciptakan mekanisme insentif-disinsentif yang meminimalkan kejahatan. Itu dasar model-model analisis yang ada sekarang, dengan asumsi utama "manusia merespon insentif". Hampir 200 tahun lalu Bastiat menekankan pentingnya diktum ini, sebuah prinsip yang juga sudah dibicarakan dalam bentuknya yang lain oleh Adam Smith jauh sebelum Bastiat.

Salah satu aspek hukum yang sampai saat ini pun seolah tabu untuk dikupas secara gamblang dalam diskusi publik adalah redistribusi. Bastiat membahasnya cukup panjang lebar. Dengan dalih sosial, negara seringkali mengeluarkan kebijakan redistribusi kekayaan: mengambil dari satu kelompok untuk diberikan kepada kelompok lain. Mudah mengatakan bahwa demi tujuan pemeratan perlu dilakukan redistribusi. Teori fundamental kesejahteraan dalam mikroekonomi pun punya justifikasi untuk redistribusi. Namun sedikit saja kekuranghatihatian dalam desain kebijakan akan bisa menyebabkan penyalahgunaan sistem baik dari sisi negara (korupsi), maupun rakyat kelompok penerima (dalam bentuk *moral hazard*, mereka merasa berhak selalu dapat perlindungan,

dan karenanya tidak merasa perlu bekerja). Celakanya, ketika kebijakan itu telah resmi dan berkekuatan hukum, ia menjadi kuat sekali sehingga, sekalipun ada perampasan, ia adalah 'perampasan yang sah'. Dan ini bisa lebih berbahaya dan sulit penanganannya ketimbang 'perampasan yang tak sah'. Maka dalam proses perumusan hukum tercipta ketegangan besar antara kelompok yang kuatir menjadi korban perampasan legal itu serta kelompok yang berusaha mengambil manfaat dari disahkannya hukum itu, di atas beban kelompok pertama.

Saya kira uraian Bastiat, sekalipun ditulis ratusan tahun lalu, adalah sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Sebuah demokrasi baru yang besar tentu rentan dengan segala fondasi hukum yang baru dipancangkan. Kisah tarik-menarik kepentingan dalam proses perumusan serta pengesahan hukum sungguh bukan asing di telinga kita. Ketika ia telah sah sebagai hukum pun, kita saksikan perampasan hak milik, yang celakanya 'atas nama hukum' atau 'demi keadilan'. Padahal yang terjadi adalah perampasan hak milik seseorang untuk diberikan kepada orang lain. Tentu pendekatan ekonomi saja tak cukup untuk mengatasi kelemahan sistem ini. Tapi Bastiat telah mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam membuat hukum. Dan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang sakral: ia buatan sekelompok manusia, dan karenanya yang juga rentan. Indonesia sedang memasuki fase baru di mana demokrasi dan desentralisasi seolah masuk mengalir begitu deras ke mana saja. Dan mereka datang dengan kelemahan di sana-sini. Hukum mungkin bisa memperbaiki. Tapi juga bisa merusak.

Dengan doktrin sosialisme, hukum seringkali hanya menjadi alat perampasan. Bastiat mengingatkan bahwa sosialisme mudah bablas menjadi perampasan yang legal. Dalam buku ini Bastiat memang keras sekali menyerang sosialisme (di samping proteksionisme dan komunisme). Ia kuatir, orang-orang

yang melihat hukum sebagai alat untuk mengorganisasikan keadilan, akan dengan mudah menjadikannya sebagai alat untuk mengorganisasikan tenaga kerja, pendidikan, bahkan agama. Merampas hak milik orang lain untuk membayar gaji guru yang diminta mengajar di sekolah-sekolah gratis menurut Bastiat termasuk perampasan legal. Tentu kita bisa memperdebatkan ini, terutama mengingat sifat barang publik dari pendidikan dasar. Namun hukum semestinya diterima bahkan oleh mereka yang harus membayar untuk redistribusi semacam itu. Di agama, hukum justru digunakan untuk menindas. Dalam pasar kerja, hukum bisa merugikan mereka yang belum masuk. Atau yang berada di dalam, namun berdiri pada kondisi marjinal.

Telah banyak logika keliru yang dihantam oleh Bastiat, termasuk aspek-aspek hukum dalam buku ini (misalnya cukai, tarif, subsidi, dan upah minimum). Buku ini hanya salah satu dari sumbangan pemikiran Bastiat. Ia telah berkelahi dengan sederet kesalahkaprahan. Mereka sempat mati, mungkin. Tapi sungguh Bastiat mungkin kecewa, bahwa saat ini, dua abad setelah jamannya, logika-logika sesat itu masih saja berkeliaran. Jamak kita dengar dan baca betapa banyak kalangan industri tetap hidup berlandas proteksi. Dan paham merkantilisme juga masih mewarnai pemerintahan. Hazlitt menulis pada tahun 1978, di edisi baru bukunya, bahwa sekalipun analisis kebijakan ekonomi telah memperlihatkan banyak kemajuan, cara berpikir politisi ternyata stagnan.[5]

Saat ini pun, 2010, kita mungkin belum bisa bersorak. Logika ekonomi sesungguhnya sederhana dan lugas. Namun karena ia cenderung terlalu sederhana, ia sulit dipelintir. Maka

---

5 *Economics in One Lesson*, New Edition. New York: Harper and Brothers, 1979.

banyak politisi, dengan lobi pengusaha, berusaha menutup-nutupinya. Sebagian lagi memang sekedar tak paham, karena informasi yang ditutupi tersebut. Celakanya, bahkan ekonom pun sering keliru. Sering kita dapati ekonom yang mengatakan bahwa 'perang atau bencana alam punya dampak positif kepada perekonmian, karena menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah'. Mereka hanya terpaku pada apa yang terlihat, menafikan apa yang tak terlihat. Akhirnya kita menyaksikan lingkaran setan yang memelihara logika sesat. Logika keliru yang berujung pada ekonomi suboptimal, di mana konsumen menjadi korban. Orang banyak terkorbankan lewat rente yang dihisap oleh yang sedikit. Orang yang bekerja dizalimi, dipaksa membayar mereka yang tidak bekerja. Dan hukum kerap mensahkan proses ini.

Karena itu semua, karya Bastiat masih relevan. Dan akan masih relevan dalam waktu yang panjang, saya kira. Inisiatif Freedom Institute dan Akademi Merdeka untuk menerjemahkan karya Bastiat ini, "Hukum", karenanya kita sambut gembira. Semoga pemikiran Bastiat bisa lebih banyak dibaca dan dipahami. Juga gaya tutur argumentasinya. Agar kita pun bisa membumikan bahasa ekonomi yang muram belaka. Agar kita tak lagi melulu diperbodoh dan diam saja.

Jakarta, Mei 2010
Arianto A. Patunru
Universitas Indonesia

PENGANTAR

VISI MORAL MASYARAKAT MERDEKA

Tom G. Palmer

Memaksa atau membujuk: mana jalan ke moralitas? Perampasan atau mengakui kepemilikan: mana jalan yang menuju kesejahteraan? Inilah pertanyaan besar dalam filsafat moral, hukum, politik, dan ekonomi. Seperti yang telah diakui oleh para pemimpin moral dan spiritual, dalam hal keagamaan tidak boleh ada pemaksaan. Frédéric Bastiat menunjukkan bahwa pemaksaan adalah cara yang buruk untuk memperlakukan orang. Tidak saja dalam hal beragama, tapi juga dalam segala lingkup hubungan manusia, karena hidup, kemerdekaan, dan hak milik adalah alamiah manusia –anugerah dari Tuhan, bukan dari manusia lain–dan bahwa apabila ada orang yang mengklaim hidup, kemerdekaan, dan hak milik orang lain untuk dirinya sendiri maka itu adalah pelanggaran hak asasi. Tidak bakal ada hasil yang bajik dari tindakan semacam itu, seperti yang Bastiat tunjukkan dengan tidak saja mengacu pada hukum moral, namun juga dengan ekplikasinya yang cermat tentang hak alamiah pada umumnya, termasuk hukum ekonomi. Dunia kehidupan manusia dibimbing oleh sebab dan akibat, termasuk akibat-akibat yang tidak diniatkan, dan kita akan hancur sendiri apabila mengabaikan hubungan-hubungan ini.

Salah satu guru moral terbesar di zaman modern adalah seorang Prancis yang sederhana, Frédéric Bastiat, yang tidak kenal capai mengabdikan hidupnya, bahkan pun ketika ajal sudah akan tiba, untuk membela perdagangan bebas, perdamaian, dan kedaulatan hukum. Bastiat lahir pada 1801, namun baru berhasil mengukirkan karya-karya terbesarnya, termasuk tulisan-tulisannya yang luar biasa berlimpah, antara 1844 dan tahun wafatnya 1850. Pada 1848, ketika ia jadi anggota parlemen Prancis, ia membantu menggugurkan proyek-proyek orang komunis. Ia membongkar banyak sekali kesesatan berpikir kaum komunis, tidak dengan kekuatan paksa atau ancaman balik, tapi dengan menggunakan akal pikiran dan selera humornya yang khas. Caranya yang lembut ini membantu Prancis menghindarkan diri dari nasib seperti yang dialami Russia dan bangsa-bangsa yang dikuasai kekaisaran Russia (kemudian Uni Soviet), terbunuhnya jutaan manusia.

Bastiat adalah seorang ahli ekonomi terkenal, bukan karena sumbangsihnya pada ilmu ini, namun karena kemampuannya menyampaikan dengan jelas prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Penerima Hadiah Nobel F.A. Hayek menyebutnya "publisis jenius" karena kemampuannya menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam masyarakat, dan memujinya khusus untuk karyanya "Apa yang Terlihat dan Apa yang Tak Terlihat", yang bagi Hayek adalah "pembelaan yang paripurna atas kemerdekaan ekonomi". Bagi yang belum membaca esai hebat Bastiat tentang apa yang terlihat dan tak terlihat tersebut ada hadiah yang menunggu; begitu esai ini dibaca dan dipahami, maka dunia pun tak akan tampak sama lagi. Ia akan sebagai dunia yang punya pilihan, biaya-biaya, dan *trade-offs*, sebuah dunia yang dipimpin oleh akal budi, logika, dan ilmu, bukan nafsu.

Hayek bukan saja menghargai pemahaman Bastiat yang mendalam atas prinsip-prinsip ilmu ekonomi, namun juga penekanannya pada prinsip-prinsip moral. Seperti yang dicatatnya: “Bastiat sungguh tepat dalam memperlakukan kebebasan memilih sebagai sebuah prinsip moral yang tidak pernah boleh dikorbankan demi pertimbangan kemudahan pencapaian sesuatu; karena mungkin tidak akan ada aspek lain dari kemerdekaan yang tidak akan dihapuskan jika ia dihargai semata-mata hanya ketika kerusakan konkrit yang diakibatkannya dapat ditunjukkan.”

Bastiat paham bahwa begitu ide kesetaraan keadilan bagi semua ditinggalkan, maka yang tinggal untuk kita adalah perang melawan semua. Jawabannya bukan, seperti yang dikemukakan beberapa orang, dengan membatasi hak suara hanya kepada beberapa orang yang terpilih saja (lagipula bagaimana kita yang sisa-sisa ini terlindungi dari ketamakan mereka?) namun dengan membatasi hukum. Seperti yang ditanyakan Bastiat: “jika hukum dibatasi hanya untuk melindungi semua orang, semua kebebasan, dan semua hak milik; jika hukum tidak lebih dari kumpulan hak individu atas pertahanan diri yang terorganisasi; jika hukum adalah rintangan, perlindungan, penghukum semua penindasan dan perampasan—apakah mungkin bahwa kita warga negara akan berselisih tentang tingkat hak suara tersebut?” Alih-alih “perampasan legal yang terbatas” (yakni yang “sedikit merampas yang banyak”) atau “perampasan universal” (“di mana semua orang merampas semua orang”), Bastiat mengusulkan tidak ada perampasan sama sekali, yang ia sebut “prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, tata-tertib, stabilitas, harmoni, dan logika.”

Ilmu ekonomi tidaklah berseberangan jalan dengan moralitas, seperti yang Bastiat tunjukkan. Ekonom yang baik

didorong oleh semangat keadilan, sama seperti pasar bebas didasarkan atas keadilan.

Jika visi moral bagi sebuah masyarakat merdeka yang berdasarkan keadilan menarik bagi Anda, wahai pembaca budiman, saya rekomendasikan untuk membaca karya-karya Bastiat yang lain, dan lalu karya-karya Ludwig von Mises, F.A. Hayek, Milton Friedman, dan masih banyak lagi pendekar akal budi, logika, dan kemerdekaan. Kami mengajak para pembaca untuk bersama-sama mengusahakan bersemainya kebebasan, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi Indonesia, dan saya rekomendasikan buku ini.

Washington, Mei 2010
Tom G. Palmer
Atlas Global Initiative for Free Trade, Peace and Prosperity

PENGANTAR

HUKUM DAN FILSAFAT KEADILAN BASTIAT

Richard M. Ebeling

Tugas membela kebebasan ekonomi tidak pernah mudah. Adam Smith mengungkapkan keputus-asaannya menyangkut masalah ini dalam *The Wealth of Nations*. Setelah memaparkan kritik tajamnya atas merkantilisme—sistem regulasi dan perencanaan pemerintah abad ke-18—ia dengan sedih menyatakan bahwa perdagangan bebas di Britania Raya sama tidak mungkinnya dengan membentuk sebuah utopia.

Ia mengatakan bahwa ada dua faktor yang menjadikan prospek keberhasilan kebebasan ekonomi tidak menjanjikan. "Bukan hanya prasangka publik," kata Smith, "namun apa yang jauh lebih tak tertaklukkan, kepentingan pribadi banyak individu, sangat menentangnya."[1] Yang Smith maksudkan sebagai prasangka publik adalah kesulitan banyak orang biasa untuk mengikuti argumen-argumen para teoretisi ekonomi yang seringkali abstrak dan kompleks yang memperlihatkan kinerja yang lebih unggul dari pasar bebas dibanding berbagai

---

1 Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Buku Empat, bab dua, (New York: Modern Library, 1937 [1776]), hal. 437-38.

bentuk intervensi dan kontrol pemerintah. Dan yang Smith maksudkan dengan kepentingan pribadi adalah berbagai macam kelompok kepentingan-khusus yang mendapatkan keuntungan dari, dan karena itu akan selalu berusaha keras untuk memelihara, regulasi-regulasi pemerintah yang membatasi atau mencegah persaingan bebas. Smith cemas kedua faktor ini secara bersama-sama akan terus-menerus merintangi logika kebebasan ekonomi untuk menang dalam arena gagasan dan politik.

Namun, pada abad ke-19 ada seorang pejuang kebebasan yang menguasai seni membuat kompleksitas pemikiran ekonomi dapat dipahami oleh orang-orang biasa: ekonom liberal-klasik Prancis, Frédéric Bastiat (1801-1850). Lebih dari satu sejarahwan pemikiran ekonomi menegaskan kemampuan istimewa Bastiat dalam merubuhkan dasar-dasar pemikiran bagi proteksionisme, sosialisme, dan intervensionisme.

Sir Alexander Gray, misalnya, mengatakan bahwa, "Tidak seorang pun yang begitu terampil dalam membuat pemikiran lawannya tampak amat sangat dungu. Bahkan hingga sekarang ini karyanya yang paling singkat tetap menyenangkan dibaca, karena alasan kejenakaannya, satirnya yang tajam dan kecermatannya dalam menusuk lawan-lawannya."[2] Lewis Haney menunjuk pada "gaya Bastiat yang menyenangkan dan jernih" dan betapa "cemerlangnya ia, dengan fabel dan ironi, menarik massa."[3]

Eduard Heimann, seorang kritikus ekonomi pasar, menggambarkan ia sebagai "Seorang penulis yang brilian, yang mencapai kemasyhuran dunia dengan parabelnya tentang para

---

2 Sir Alexander Gray, *The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey* (London: Longmans, Green, 1931), hal. 244-45.

3 Lewis H. Haney, *History of Economic Thought* (New York: Macmillan, 1936), hlm. 331-32.

pembuat lilin, yang mengajukan permintaan akan proteksi terhadap persaingan yang tidak seimbang agar komunitas tersebut bisa menjadi lebih kaya dengan memperkaya industri mereka."[4] Charles Gide dan Charles Rist menyatakan bahwa "Jika kaum Proteksionis modern tidak lagi berbicara tentang "serbuan [barang-barang] terhadap sebuah negara" atau tentang "invasi barang-barang asing" . . . kita seringkali lupa bahwa semua ini disebabkan oleh pamflet-pamflet kecil namun cerdas yang ditulis oleh Bastiat . . . Tak seorang pun yang bisa memperlihatkan secara lebih mencemooh ketidak-konsistenan yang menggelikan dari pembuatan terusan pada pegunungan-pegunungan yang membelah berbagai negeri, dengan maksud mempermudah pertukaran, sambil pada saat yang bersamaan meneguhkan rintangan bea-cukai pada tiap-tiap perbatasannya."[5] Dan meskipun pena Bastiat sangat tajam menyerang gagasan-gagasan proteksionis dan kolektivis pada masanya, William Scott menegaskan bahwa "sikap orang liberal Prancis tersebut tenang dan bermartabat dan terlepas dari kritiknya yang tajam ia memperlihatkan penghargaan pada motif-motif lawan-lawannya. Ia sangat menghargai mereka karena keinginan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, namun ingin memperlihatkan bahwa mereka berada di jalan yang salah dan, jika mungkin, membenarkan mereka."[6]

Karena sifat-sifat itulah Joseph A. Schumpeter menyebut

---

4 Eduard Heimann, *History of Economic Doctrines: An Introduction to Economic Theory* (London: Oxford University Press, 1945), hlm. 124.

5 Charles Gide dan Charles Rist, *A History of Economic Doctrines, From the Time of the Physiocrats to the Present Day* (Boston: D. C. Heath, 1915), hlm. 329-30.

6 William A. Scott, *The Development of Economics* (New York: The Century Co., 1933), hlm. 244.

Bastiat "jurnalis ekonomi paling cemerlang yang pernah hidup."[7] Dan Ludwig von Mises memujinya sebagai seorang "stilis yang cemerlang, sehingga membaca tulisan-tulisannya kita merasakan kesenangan yang begitu khas . . . Kritiknya terhadap semua kecenderungan proteksionis dan yang terkait dengannya bahkan hingga sekarang ini belum terlampaui. Kaum proteksionis dan intervensionis tidak mampu mengajukan satu kata jawaban yang masuk akal dan obyektif."[8]

Penulis-penulis lain mendasarkan sebagian dari karya mereka pada karyanya. Pada awal abad ke-20, ekonom pasar-bebas Prancis Yves Guyot mengatakan bahwa buku kecilnya, *Economic Prejudices,* ditulis berdasarkan Frédéric Bastiat, dengan tujuan "menyatakan kebenaran-kebenaran dalam bentuk yang mudah dan ringkas yang mudah diingat, serta mengkritik berbagai kesalahan dengan sarana bukti-bukti yang bisa dilakukan setiap orang," sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bastiat setengah abad sebelumnya.[9] Dan tak diragukan, adaptasi atas metode dan pendekatan Bastiat yang paling terkenal dan berpengaruh pada abad ke-20 adalah *Economics in One Lesson* karya Henry Hazlitt, di mana sang penulis berkata, "Karya ini bisa dilihat sebagai suatu modernisasi, perluasan, dan generalisasi dari pendekatan yang ditemukan dalam pamflet Bastiat," yang dikenal dengan judul "Apa yang Terlihat dan Apa yang Tidak Terlihat."[10]

---

7 Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 1954), hlm. 500.

8 Ludwig von Mises, *Liberalism: The Classical Tradition* (Irvington-on-Hudson, N. Y.: Foundation for Economic Education, 1996 [1927]), hlm. 197.

9 Yves Guyot, *Economic Prejudices,* (London: Swan Sonnenschein, 1910), hlm. v.

10 Henry Hazlitt, *Economics in One Lesson* (New York: Harper & Brothers, 1946).

CLAUDE FRÉDÉRIC BASTIAT lahir pada 30 Juni 1801, di Bayonne, Prancis, anak dari seorang saudagar terkemuka.[11] Ibunya meninggal dunia saat ia berusia 7 tahun, dan ayahnya wafat 2 tahun kemudian, saat Frédéric berusia 9 tahun. Ia dibesarkan oleh seorang bibi, yang mengirimkannya ke College of Sorèze saat ia berusia 14 tahun. Namun pada usia 17 tahun ia keluar tanpa menyelesaikan syarat-syarat untuk mendapatkan gelar dan masuk dalam perusahaan dagang pamannya di Bayonne. Tak lama kemudian ia membaca karya-karya ekonom liberal-klasik Prancis Jean-Baptiste Say, dan karya-karya itu mengubah kehidupan dan pemikirannya.[12] Ia memulai suatu studi ekonomi politik serius dan tak lama kemudian menemukan karya-karya dari banyak penulis liberal-klasik yang lain di Prancis dan Britania Raya.

Pada 1825 ia mewarisi sebidang tempat tinggal sedang di Mugron dari kakeknya dan tinggal di sana hingga 1846, saat ia pindah ke Paris. Selama 20 tahun ini Bastiat mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk berbagai macam bacaan tentang berbagai macam pokok-soal, berbagi buku dan gagasan dengan temannya Félix Coudroy. Tampak bahwa Coudroy memiliki kecenderungan sosialis, dan Bastiat mulai

11 Ringkasan singkat kehidupan dan aktivitas profesional Bastiat berikut ini diambil terutama dari Dean Russell, *Frédéric Bastiat: Ideas and Influences* (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1965); juga Dean Russell, *Frédéric Bastiat and the Free Trade Movement in France and England, 1840-1850* (Geneva: Imprimarie Albert Kundig, 1959); dan George C. Roche, *Frédéric Bastiat: A Man Alone* (Hillsdale, Mich.: Hillsdale College Press, 1977).

12 Jean-Baptiste Say, *A Treatise on Political Economy, or the Production, Distribution and Consumption of Wealth* [1921] (N.Y.: Augustus M. Kelley, 1971); Say, *Letters Mr. Malthus on Several Subjects of Political Economy* [1821] (N.Y.: Augustus M. Kelley, 1967); dan R. R. Palmer, ed., *J.-B. Say: An Economist in Troubled Times* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997).

mematangkan ketrampilannya dalam pemikiran dan penulisan yang jernih dengan merumuskan argumen-argumen yang pada akhirnya berhasil membujuk temannya pada filsafat kebebasan.

Pada akhir 1820-an dan 1830-an ia mulai menulis berbagai monograf dan esai tentang beragam topik ekonomi. Namun reputasi nyatanya sebagai seorang penulis mulai pada 1844, saat ia menerbitkan sebuah artikel panjang yang membela perdagangan bebas dan kemudian sebuah monograf tentang *Cobden and the League: The English Movement for Free Trade*. Saat menulis karya-karya ini Bastiat mulai melakukan korespondensi dengan Richard Cobden, salah satu pemimpin utama British Anti-Corn Law League, sebuah asosiasi yang bekerja untuk pencabutan semua rintangan terhadap perdagangan bebas. Kedua pendukung kebebasan ekonomi tersebut segera menjadi sahabat, dan saling mendukung satu sama lain dalam memperjuangkan kebebasan.

Keberhasilan tulisan-tulisan ini, dan inspirasi dari keberhasilan aktivitas-aktivitas perdagangan-bebas Cobden yang mengakhiri proteksionisme agrikultural di Britania Raya pada 1846, menyebabkan perpindahan Bastiat ke Paris untuk mendirikan sebuah asosiasi perdagangan-bebas Prancis dan memulai *Le Libre Échange,* sebuah surat kabar yang memperjuangkan gagasan ini.[13] Selama dua tahun Bastiat bekerja mengorganisasi dan mempropagandakan perdagangan bebas. Pada awalnya ia mampu menarik beragam orang dalam

13 Untuk ulasan singkat tentang gerakan perdagangan-bebas di Britania Raya dan kemenangannya pada pertengahan abad ke-19, lihat Richard M. Ebeling, *Austrian Economics and the Political Economy of Freedom* (Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2005), bab 10: "The Global Economy and Classical Liberalism: Past, Present, and Future," hlm. 247-281, dan khususnya hlm. 248-252.

perdagangan dan industri untuk mendukung aktivitas-aktivitasnya, antara lain memberi pidato, merancang legislasi untuk mencabut proteksionisme Prancis, dan menyiapkan berbagai tulisan untuk mengubah opini publik. Namun semua itu tak ada gunanya. Ada terlalu banyak kepentingan pribadi yang mendapat keuntungan dari privilese dan kemudahan yang diberikan pemerintah, dan ia tidak mampu memunculkan minat terus-menerus pada perjuangannya di kalangan publik pada umumnya. Tampak bahwa Adam Smith benar saat meratapi berbagai prasangka publik dan kekuatan kepentingan, paling tidak di Prancis.

Setelah revolusi pada Februari 1848, Bastiat mulai berkarier dalam politik, pertama-tama bekerja dalam Majelis Konstituen Prancis dan kemudian dalam Majelis Legislatif. Setelah mencurahkan sebagian besar karya awalnya untuk memperlihatkan berbagai kesalahan argumen yang mendukung proteksionisme, Bastiat mengalihkan perhatiannya pada musuh baru kebebasan ekonomi: sosialisme. Dalam Majelis Legislatif tersebut ia menyampaikan pidato-pidato yang tajam menentang program-program kerja-publik, skema-skema pekerjaan-nasional, usulan-usulan redistribusi-kekayaan, nasionalisasi industri, dan pemikiran-pemikiran yang mendukung perluasan kontrol birokratis terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Namun karena tuberkulosis yang semakin memburuk yang memperlemah suaranya, ia beralih ke kata-kata tertulis, dan menghasilkan sejumlah besar esai yang menguraikan berbagai absurditas yang ada dalam argumen-argumen kaum sosialis.

Bastiat terakhir kali muncul dalam Majelis tersebut pada Februari 1850. Pada musim semi tahun itu kesehatannya merosot tajam sehingga ia terpaksa melepaskan berbagai tanggung jawab legislatifnya dan menghabiskan musim panas di

pegunungan Pyrénées di selatan Prancis. Ia kembali ke Paris pada September dan mengunjungi teman-temannya yang memperjuangkan perdagangan bebas, sebelum pergi ke Italia untuk mencari pengobatan bagi tuberkulosisnya. Ia meninggal di Roma pada 24 Desember 1850, pada usia 49.

Warisan intelektual Frédéric Bastiat dalam memperjuangkan kebebasan ekonomi terangkum dalam tiga volume. Dua di antaranya adalah kumpulan esai dan artikelnya yang paling menggigit, lucu, dan bernas, dan tersedia dalam bahasa Inggris dengan judul *Economic Sophisms*[14] dan *Selected Essays on Political Economy.*[15] Pada tahun-tahun terakhirnya, Bastiat mencurahkan sebagian waktunya pada karya umum tentang filsafat sosial dan prinsip-prinsip ekonomi, yang terbit dengan judul *Economic Harmonies.*[16]

Sebagaimana ditegaskan oleh Henry Hazlitt, gagasan utama dalam banyak tulisan Bastiat terangkum dalam esainya "What Is Seen and What Is Not Seen," yang merupakan tulisan terakhir yang ia tulis sebelum kematiannya pada 1850.[17] Ia menyatakan bahwa dampak jangka-pendek dari suatu tindakan atau kebijakan seringkali bisa sangat berbeda dari dampak jangka-panjangnya, dan bahwa dampak-dampak yang lebih jauh ini dalam kenyataannya mungkin berlawanan dari apa yang diharapkan atau awalnya direncanakan seseorang.

---

14 *Economic Sophisms*, terj. dan ed. Arthur Goddard, dengan kata pengantar oleh Henry Hazlitt (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1996 [1845]).

15 *Selected Essays on Political Economy,* terj. Seymour Cain, ed. George B. de Huszar, dengan kata pengantar oleh F.A. Hayek (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1995 [1964]).

16 *Economic Harmonies,* terj. W. Hayden Boyers, ed. George B. de Huszar, dengan kata pengantar oleh Dean Russell (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1996 [1850]).

17 Dalam *Selected Essays,* hlm. 1-50.

Bastiat mampu menerapkan prinsip yang-terlihat dan yang-tak-terlihat tersebut pada pajak dan pekerjaan pemerintah. Ketika pemerintah memajaki, apa yang terlihat adalah para pekerja yang dipekerjakan dan hasil kerja mereka: sebuah jalan, jembatan, atau kanal. Apa yang tak-terlihat adalah semua hal lain yang akan dihasilkan jika uang pajak tersebut tidak diambil dari individu-individu di sektor swasta dan jika sumber daya dan buruh yang dipekerjakan pemerintah tersebut bebas melayani hasrat dari warga negara biasa tersebut. Pemerintah, menurut Bastiat, tidak menghasilkan apa pun yang tidak bergantung pada sumber daya dan buruh yang ia alihkan dari penggunaan pribadi tersebut.

Pengetahuan yang sederhana namun sangat penting ini merupakan senjata teoretis yang dengannya Bastiat mampu memperlihatkan berbagai kesalahan dan kontradiksi dalam gagasan-gagasan kaum proteksionis maupun sosialis. Demikianlah dalam esai-esai seperti "Abundances and Scarcity," "Obstacle and Cause," dan "Effort and Result," ia memperlihatkan bahwa rintangan dan larangan terhadap kebebasan berdagang hanya memunculkan kemiskinan.[18]

Ia menunjukkan bahwa masing-masing dari kita adalah seorang konsumen sekaligus produsen. Untuk mengkonsumsi sebuah barang kita harus membuatnya sendiri atau membuat barang lain yang kita pikir akan ada orang lain yang mau menukarnya dengan barang yang kita inginkan. Sebagai konsumen kita menginginkan sebanyak mungkin barang dengan harga yang serendah mungkin. Dengan kata lain, kita menginginkan keberlimpahan. Namun sebagai produsen kita menginginkan kelangkaan barang-barang yang kita bawa ke pasar. Dalam persaingan bebas, di mana semua pertukaran

18 *Economic Sophisms,* hlm. 7-27.

adalah sukarela, satu-satunya jalan untuk "menangkap" pelanggan dan mendapatkan penghasilan yang memungkinkan tiap-tiap kita untuk, pada gilirannya, menjadi konsumen adalah menawarkan barang-barang yang lebih baik, lebih murah, dan lebih banyak dibanding para pesaing kita. Bastiat memperingatkan bahwa alternatif terhadap metode ini adalah masing-masing kita sebagai seorang produsen beralih ke pemerintah untuk mendapatkan dari tetangga kita apa yang tak mampu kita dapatkan melalui perdagangan yang damai dan tanpa kekerasan di pasar.

Di sinilah terletak distingsi terkenal Bastiat antara rampasan yang ilegal dan legal, yang merupakan inti dari analisanya dalam *The Law.*[19] Tujuan pemerintah, menurutnya, adalah melindungi hak-hak individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Tanpa rasa aman seperti itu manusia tereduksi dalam kehidupan primitif yang penuh kecemasan dan pertahanan-diri, di mana setiap tetangga bisa menjadi musuh potensial yang siap merampas apa yang telah dihasilkan orang lain. Jika sebuah pemerintah dibatasi secara ketat untuk melindungi hak-hak manusia, maka kedamaian berlaku, dan manusia bisa terus bekerja untuk memperbaiki kehidupannya, berhubungan dengan tetangga mereka dalam pembagian kerja dan pertukaran.

Namun pemerintah bisa juga berbalik melawan mereka yang seharusnya ia lindungi hak miliknya. Bisa muncul perampasan legal, di mana kekuasaan pemerintah digunakan oleh berbagai individu dan kelompok untuk merintangi lawan-lawan mereka bersaing, untuk membatasi kesempatan-kesempatan perdagangan domestik dan luar negeri konsumen lain dalam

19 "The Law," dalam *Selected Essays,* hlm. 51-96; dan "The Physiology of Plunder," dalam *Economic Sophisms,* hlm. 129-46.

masyarakat tersebut, dan karena itu mencuri kekayaan suatu masyarakat. Hal ini, menurut Bastiat, adalah asal-usul dan dasar proteksionisme, regulasi, dan perpajakan redistributif.

Namun konsekuensi perampasan legal tersebut tidak hanya pelegitimasian politik terhadap pencurian dan hancurnya moralitas karena kaburnya distingsi antara benar dan salah—betapapun penting dan berbahayanya hal ini bagi stabilitas dan kemakmuran jangka panjang masyarakat. Kebijakan-kebijakan seperti itu juga niscaya mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Setiap proteksi perdagangan, setiap setiap kekangan regulasi domestik, setiap tindak perpajakan redistributif di atas jumlah minimum yang diperlukan untuk menjamin perlindungan yang sama terhadap hak-hak individu, menurut Bastiat, mengurangi produksi dan persaingan dalam masyarakat. Kelangkaan menggantikan keberlimpahan. Pembatasan persaingan mengurangi pasokan barang-barang yang tersedia bagi semua anggota masyarakat tersebut. Penetapan kekangan-kekangan proteksionis pada perdagangan domestik atau luar negeri mengurangi ketersediaan barang-barang umum dan menjadikan barang-barang tersebut lebih mahal. Pada akhirnya, setiap orang dibuat menjadi lebih miskin. Dan demikianlah Bastiat mencapai kesimpulannya yang terkenal bahwa negara adalah fiksi besar yang melaluinya setiap orang berusaha untuk hidup dengan mengorbankan setiap orang lain.

Mengapa perampasan legal terjadi? Bastiat melihat asal-usulnya dalam dua sumber. Pertama, sebagaimana yang telah kita lihat, sebagian orang melihatnya sebagai sarana yang lebih mudah untuk mendapatkan kekayaan dibanding melalui kerja dan produksi. Mereka menggunakan kekuasaan politik untuk meredistribusi dari orang lain apa yang tidak mau atau

tidak mampu mereka dapatkan dari tetangga mereka melalui pertukaran sukarela di pasar. Dengan kata lain, salah satu dasar perampasan legal adalah semangat pencurian yang menyesatkan.

Kedua, dan jauh lebih berbahaya, sumber perampasan legal tersebut adalah mentalitas arogan dari sang perancang sosial. Bastiat menunjukkan bahwa dari masa ke masa para filosof sosial dan politik telah melihat kemanusiaan sebagai sesuatu yang pasif, mirip dengan lempung yang menunggu dibentuk, dirancang, dan digerakkan menurut desain elite yang secara intelektual lebih unggul.

Dan yang terus relevan, Bastiat menyatakan bahwa elite politik memuji ideal demokrasi, yang di dalamnya "rakyat" memilih orang-orang yang akan memegang jabatan politik. Namun begitu proses pemilihan selesai, orang-orang yang terpilih menempati jabatan politik tinggi memegang kendali perencanaan, pengarahan, dan pengontrolan setiap aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Tugas demokrasi modern, tampaknya, adalah secara berkala mengangkat orang-orang yang akan menjadi diktator-diktator sosial kita.

Apakah ini cara manusia harus hidup? Apakah perampasan ilegal dan legal merupakan satu-satunya bentuk eksistensi sosial? Bastiat menjawab tidak. Dalam *Economic Harmonies* ia berusaha menjelaskan watak dan logika sebuah sistem asosiasi manusia yang damai melalui produksi dan perdagangan. Para sejarahwan pemikiran ekonomi dan para kritikus Bastiat yang lain menyatakan bahwa karya ini memperlihatkan bahwa, terlepas dari bakat jurnalistiknya yang cemerlang, ia gagal sebagai seorang teoretisi ekonomi yang serius. Mereka menunjuk pada penggunaannya atas suatu bentuk teori nilai pekerjaan atau teorinya yang salah tentang tabungan, modal,

dan bunga.[20]

Namun terlepas dari kesalahan dan keterbatasan ini, ada sebuah aspek dari *Economic Harmonies* yang masih menjadikannya sangat inspiratif. *Harmonies* berusaha untuk menawarkan suatu visi besar tentang hubungan kausal antara kerja, pembagian kerja, pertukaran sukarela, dan perbaikan bersama kondisi manusia, serta pentingnya hak milik pribadi, kebebasan individu, dan perdagangan domestik dan luar negeri. Dalam kebebasan ada harmoni sosial, karena tiap-tiap manusia melihat tetangganya bukan sebagai musuh melainkan sebagai rekan dalam berbagai proses perbaikan manusia yang terus-menerus berjalan. Ketika hubungan didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan bersama, tidak akan ada perampasan, hanya kemakmuran yang terus ditingkatkan, karena masing-masing bekerja berdagang dengan tetangga-tetangganya dan mendapatkan semua hal yang menjadikan hidup lebih baik bagi masing-masing dan semua orang.

Jika orang melihat pada periode di mana Bastiat mencurahkan upayanya untuk memperjuangkan kebebasan dan perdagangan bebas, kesimpulannya tampaknya adalah bahwa kehidupannya berakhir dengan kegagalan. Baik selama masa hidupnya maupun setelah kematiannya, Prancis tetap berada dalam cengkeraman semangat proteksionis dan intervensionis, dan tidak pernah mencapai suatu tingkat kebebasan ekonomi yang terjadi di Britania Raya selama paruh kedua abad ke-19.

Namun demikian, kehidupan Bastiat harus dilihat sebagai suatu keberhasilan yang gemilang. Selama 150 tahun sejak ia meninggal, setiap generasi baru pendukung kebebasan ekonomi terinspirasi oleh tulisan-tulisannya. Fabel-fabel

---

20 Lihat, misalnya, Eugen von Bohm-Bawerk, *Capital and Interest,* vol. 1: *History and Critique of Interest Theories* (South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1959), hlm. 191-94.

dan esai-esainya terus dibaca dengan antusias seolah-olah mereka ditulis kemarin, karena mereka mengkaji watak dasar hubungan manusia dan bahaya campur-tangan politik pada tatanan sosial dan pasar.

1998
Richard M. Ebeling
Foundation for Economic Education

HUKUM

Frédéric Bastiat

Hukum diselewengkan! Dan kekuasaan negara untuk mengatur menyeleweng bersamanya! Hukum, menurut saya, tidak hanya menyimpang dari tujuannya yang tepat, tapi dipakai untuk mengejar suatu tujuan yang bertentangan! Hukum menjadi senjata bagi ketamakan! Bukannya mengurangi kejahatan, hukum sendiri bersalah atas kejahatan yang seharusnya ia atasi!

Jika benar, ini adalah fakta serius, dan saya secara moral terpanggil untuk mengingatkan seluruh warga negara pada masalah ini.

Anugerah Tuhan

Anugerah Tuhan kepada kita sama seperti anugerah Tuhan kepada setiap orang lain. Anugerah ini adalah hidup—hidup dalam arti fisik, intelektual, dan moral.

Namun hidup tidak bisa memelihara dirinya sendiri. Kepada kita Tuhan memercayakan tanggung jawab memelihara, memajukan, dan menyempurnakannya. Agar kita bisa berhasil, Ia menganugerahkan sejumlah kemampuan. Dan Ia telah menempatkan kita di tengah-tengah sumber daya alam yang melimpah. Dengan kemampuan-kemampuan ini kita

dapat mengolah sumber-sumber daya alam menjadi produk yang bisa kita pergunakan. Proses ini perlu supaya hidup bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Hidup, kemampuan, produksi—dengan kata lain individualitas, kebebasan, hak milik—inilah manusia. Dan terlepas dari segala tipu daya para politisi, ketiga anugerah Tuhan ini mendahului—dan lebih unggul dari—seluruh peraturan yang dibuat manusia.

Hidup, kebebasan, dan hak milik tidak lahir karena manusia membuat undang-undang. Sebaliknya, kenyataan bahwa hidup, kebebasan, dan hak milik telah ada sebelumnya itulah yang menyebabkan manusia pada awalnya membuat undang-undang.

Mendefinisikan Hukum

Lalu, apa itu hukum? Ia adalah organisasi hak individu secara kolektif untuk membela diri secara sah.

Masing-masing dari kita punya hak alamiah—dari Tuhan—untuk mempertahankan kedirian, kebebasan, dan hak milik kita. Ini adalah tiga syarat dasar kehidupan, dan pemeliharaan salah satu dari ini bergantung pada pemeliharaan atas dua yang lainnya. Karena apa itu kemampuan-kemampuan kita kalau bukan perluasan dari individualitas kita? Dan apa pula hak milik itu jika bukan perluasan dari kemampuan-kemampuan kita?

Jika semua orang berhak mempertahankan—bahkan dengan menggunakan kekuatan—kediriannya, kebebasannya, dan hak miliknya, maka hal ini berarti bahwa sekelompok orang berhak untuk mengorganisasi dan mendukung kekuatan bersama untuk melindungi hak ini secara terus-menerus. Jadi prinsip hak kolektif—alasan ia ada dan sah—adalah berdasarkan pada hak individu. Dan kekuatan bersama yang

melindungi hak kolektif ini, secara logis, tidak bisa bertujuan atau bermisi apa pun selain tujuan atau misi dari sesuatu yang digantikannya. Dengan demikian, karena adalah tidak sah bagi seorang individu untuk memaksakan kedirian, kebebasan, atau hak miliknya pada individu yang lain, maka kekuatan bersama itu pun—untuk alasan yang sama—tidak sah apabila digunakan untuk menghancurkan kedirian, kebebasan, atau hak milik individu atau kelompok.

Penyelewengan dari kekuatan itu, dalam kedua kasus di atas, akan bertentangan dengan premis kita. Kekuatan telah diberikan kepada kita untuk mempertahankan hak-hak individual kita. Siapa yang berani mengatakan bahwa kekuatan diberikan kepada kita untuk menghancurkan hak-hak setara yang dimiliki saudara-saudara kita? Karena tidak ada individu, bertindak secara sendiri-sendiri, bisa secara sah menggunakan kekuatan untuk menghancurkan hak-hak orang lain, tidakkah hal ini secara logis berarti bahwa prinsip yang sama juga berlaku bagi kekuatan bersama yang tidak lain adalah gabungan yang terorganisasi dari semua kekuatan individu?

Jika ini benar, maka tak ada yang lebih jelas ketimbang ini: Hukum adalah organisasi hak alamiah pertahanan diri yang sah. Ia adalah suatu kekuatan bersama pengganti kekuatan-kekuatan individu. Dan, sebagaimana hak individu yang alamiah dan sah, kekuatan bersama ini seharusnya hanya boleh dipakai untuk melindungi kedirian, kebebasan, dan hak milik; untuk memelihara hak masing-masing individu, dan menjadikan *keadilan* berdaulat atas kita semua.

Pemerintahan Adil dan Langgeng

Seandainya sebuah negeri dibangun atas asas ini, saya rasa suatu keteraturan di antara manusia akan tercipta, baik dalam pemikiran maupun dalam perbuatan. Saya rasa negeri seperti

itu akan memiliki pemerintahan yang paling sederhana, mudah diterima, ekonomis, terbatas, tidak menindas, adil, dan langgeng—apa pun sistem politiknya.

Di bawah pemerintahan seperti itu, setiap orang akan paham bahwa ia memiliki segala bentuk privilese sekaligus pula segala bentuk tanggung jawab atas eksistensinya. Tak seorang pun akan berselisih paham dengan pemerintah, asalkan kediriannya dihormati, ia bebas bekerja, dan hasil kerjanya dilindungi dari semua ancaman yang tak adil. Ketika berhasil, kita tidak harus berterimakasih kepada negara atas keberhasilan kita. Dan sebaliknya, ketika tidak berhasil, kita tidak akan lagi berpikir untuk menyalahkan negara atas kemalangan kita sebagaimana para petani tak menyalahkan negara karena hujan es atau cuaca dingin. Dalam konsep pemerintahan seperti ini, negara hadir hanya dalam bentuk rasa aman yang kita nikmati.

Bisa dikatakan lebih jauh bahwa, karena tak ada campur-tangan negara dalam masalah-masalah pribadi, keinginan kita dan pemuasan keinginan kita secara logis akan berkembang sendiri. Kita tidak akan melihat keluarga-keluarga miskin mencari instruksi tertulis sebelum mereka mendapatkan roti. Kita tidak akan melihat kota-kota besar tumpat padat dengan mengorbankan wilayah-wilayah pedesaan, atau sebaliknya. Kita tidak akan melihat tercerabutnya modal, tenaga kerja, dan populasi akibat keputusan-keputusan legislatif.

Sumber-sumber eksistensi kita terancam dan menjadi tidak pasti karena ketercerabutan yang disebabkan oleh negara. Dan lebih jauh, ketercerabutan demikian semakin besar membebani pemerintah dengan berbagai tanggung jawab.

Penyelewengan Hukum

Namun sayang, hukum sama sekali tidak membatasi dirinya pada fungsi-fungsi yang seharusnya. Dan ketika ia melampaui

fungsi-fungsi yang seharusnya itu, ia melampauinya tidak hanya pada masalah-masalah yang sepele dan yang tanpa dampak luas. Hukum sudah bergerak lebih jauh dari itu; ia telah berkembang melawan tujuannya sendiri. Hukum sudah dipakai untuk menghancurkan tujuannya sendiri: Ia telah dipakai untuk memberangus keadilan yang seharusnya ia pelihara; untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya ia junjung tinggi. Hukum telah menempatkan kekuatan kolektif untuk memihak pihak yang keji yang ingin, tanpa pengorbanan diri sama sekali, memanfaatkan kedirian, kebebasan, dan hak milik orang lain. Ia telah mengubah perampasan menjadi hak, demi untuk melindungi perampasan. Dan ia telah mengubah pertahanan diri yang sah menjadi suatu kejahatan, demi untuk menghukum hak pertahanan diri yang sah.

Bagaimana penyelewengan hukum ini terjadi? Dan apa akibatnya?

Hukum menyeleweng karena pengaruh dua sebab yang berbeda satu sama lain: ketamakan yang dungu dan filantropi yang salah. Mari kita bicarakan dulu yang pertama.

Kecenderungan Mematikan

Pemeliharaan-diri dan pengembangan-diri adalah aspirasi atau keinginan manusia pada umumnya. Dan jika setiap orang bisa dengan bebas memakai kemampuan-kemampuannya dan menikmati hasil-hasil kerjanya, kemajuan sosial akan terus terjadi dan tiada henti.

Namun ada juga kecenderungan manusia yang lain. Ketika mereka bisa, mereka ingin hidup dan makmur dengan mengorbankan orang lain. Ini bukan tuduhan ngawur. Juga bukan karena berjiwa kelam dan tanpa rasa iba. Catatan sejarah membuktikan: terjadi terus perang, migrasi massal, persekusi

keagamaan, perbudakan universal, ketidakjujuran dalam perdagangan, dan monopoli. Kecenderungan mematikan ini berakar pada watak manusia—dalam insting primitif, universal, dan yang tak dapat ditekan yang mendorongnya untuk memuaskan hasrat-hasratnya dengan rasa sakit yang sesedikit mungkin.

Hak Milik dan Perampasan

Manusia dapat hidup dan memuaskan hasrat-hasratnya hanya dengan terus bekerja; dengan terus memakai kemampuan-kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam. Proses ini adalah asal-usul hak milik.

Namun juga benar bahwa manusia bisa hidup dan memuaskan hasrat-hasratnya dengan merebut dan mengonsumsi produk-produk hasil kerja orang lain. Proses ini adalah asal-usul perampasan.

Karena manusia secara alamiah cenderung ingin menghindari rasa sakit—dan karena kerja pada dirinya sendiri adalah rasa sakit—ini berarti manusia akan cenderung melakukan perampasan ketika itu adalah lebih mudah ketimbang bekerja. Sejarah dengan jelas memperlihatkan hal ini. Dan dalam keadaan ini, agama maupun moralitas tidak dapat menghentikannya.

Lalu, kapan perampasan berhenti? Ia berhenti ketika ia menjadi lebih menyakitkan dan lebih berbahaya ketimbang kerja. Karena itu, jelas bahwa tujuan hukum yang tepat adalah menggunakan kekuatan kolektifnya untuk menghentikan kecenderungan ke arah perampasan yang mematikan ini. Seluruh tindakan hukum seharusnya adalah untuk melindungi hak milik dan menghukum tindak perampasan.

Namun, pada umumnya yang membuat hukum adalah manusia atau sekelompok manusia. Dan karena hukum tidak

bisa berjalan tanpa disetujui dan didukung oleh suatu kekuatan yang dominan, maka kekuatan ini harus dipercayakan pada mereka yang membuat hukum.

Kenyataan ini, ditambah dengan kecenderungan mematikan yang ada dalam hati manusia untuk memuaskan keinginan-keinginannya dengan usaha yang sekecil mungkin, menjelaskan penyelewengan hukum yang terjadi hampir secara universal. Dengan demikian, bagaimana hukum sampai menyimpang menjadi mudah dipahami. Alih-alih untuk menghentikan ketidakadilan, hukum malah telah menjadi senjata ketidakadilan yang sangat kuat. Mudah untuk memahami mengapa hukum dipakai oleh si pembuat undang-undang untuk sedikit banyak menghancurkan kemerdekaan pribadi orang-orang dengan perbudakan, kebebasan mereka dengan penindasan, dan hak milik mereka dengan perampasan. Hal ini dilakukan, sesuai dengan proporsi kekuasaan yang dipegang si pembuat undang-undang, demi keuntungan mereka sendiri.

Korban Perampasan

Manusia secara alamiah memberontak terhadap ketidak-adilan yang menimpanya. Dengan demikian, ketika perampasan dilakukan atas dasar hukum demi keuntungan mereka yang membuat hukum, maka semua kelas yang terampas bagaimanapun akan mencoba untuk masuk ke arena pembuatan hukum—secara damai ataupun revolusioner. Berdasarkan tingkat kecerdasan mereka, kelas-kelas yang terampas ini mungkin mengajukan satu atau dua tujuan yang sepenuhnya berbeda saat mereka berusaha untuk mendapatkan kekuasaan politik: atau mereka mungkin ingin menghentikan perampasan berdasarkan hukum itu, atau mereka mungkin ingin ikut ambil bagian di dalamnya.

Sengsaralah suatu bangsa apabila yang umum di antara para

korban perampasan legal tersebut, yang kemudian mendapatkan kekuasaan untuk membuat hukum, adalah tujuan yang terakhir!

Sebelum hal itu terjadi—kelompok kecil menjalankan perampasan berdasarkan hukum terhadap kelompok yang lebih besar—pembuatan hukum hanya terbatas pada sedikit orang. Lalu partisipasi dalam pembuatan hukum menjadi lebih universal. Dan kemudian, manusia berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan mereka yang saling berbenturan dengan perampasan universal. Alih-alih mengikis berbagai ketidakadilan yang ada dalam masyarakat, mereka menjadikan ketidakadilan ini umum. Segera setelah kelas-kelas yang terampas tersebut mendapatkan kekuasaan politik, mereka membangun sebuah sistem pembalasan dendam terhadap kelas-kelas yang lain. Mereka tidak menghapus perampasan legal itu. (Tujuan ini akan menuntut kecerdasan yang lebih besar dibanding yang mereka miliki). Sebaliknya, mereka berusaha menyamai atau melebihi para pendahulu mereka yang sesat dengan berpartisipasi dalam perampasan legal ini, meskipun hal ini bertentangan dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

Sebelum keadilan berdaulat, hal ini seolah-olah niscaya akan terjadi, bahwa manusia akan menderita terus-menerus akibat aksi saling balas ini—sebagian karena sifat buruk mereka, dan sebagian karena kurangnya pemahaman mereka.

Dampak Perampasan

Mustahil untuk memperkenalkan lagi ke masyarakat suatu perubahan yang lebih besar dan suatu kejahatan yang lebih besar ketimbang hal ini: pengubahan hukum menjadi suatu instrumen perampasan.

Apa dampak-dampak penyimpangan seperti itu? Butuh

berjilid-jilid buku untuk menjabarkannya semua. Karena itu di sini kita harus puas dengan menunjuk pada yang paling menonjol saja.

Pertama-tama, hal ini mengikis dari nurani setiap orang perbedaan antara keadilan dan ketidakadilan.

Masyarakat tidak akan bisa ada kecuali jika hukum, sampai batas-batas tertentu, tetap dihormati. Cara paling aman untuk membuat hukum dihormati adalah menjadikannya sesuatu yang terhormat. Ketika hukum dan moralitas bertentangan satu sama lain, warga negara dihadapkan pada pilihan pahit: atau kehilangan cita rasa moral mereka atau kehilangan penghormatan mereka kepada hukum. Dua keburukan ini memiliki dampak yang sama, dan akan sulit bagi seseorang untuk memilih di antara keduanya.

Watak hukum adalah memelihara keadilan. Pandangan yang lazim dalam pikiran orang-orang adalah bahwa hukum dan keadilan adalah sesuatu yang setali tiga uang. Dalam diri kita semua ada kecenderungan kuat untuk percaya bahwa apa pun yang berdasarkan hukum adalah juga sesuatu yang sah. Keyakinan ini begitu merasuk sehingga banyak orang secara salah beranggapan bahwa sesuatu adalah "adil" karena hukum menjadikannya demikian. Dengan demikian, untuk menjadikan perampasan tampak adil dan sakral bagi banyak nurani, yang diperlukan adalah bagi hukum untuk menetapkan dan menyetujuinya. Perbudakan, pengekangan, dan monopoli menemukan para pembelanya bukan hanya di kalangan mereka yang mendapatkan keuntungan darinya melainkan juga di kalangan mereka yang menderita karenanya.

Nasib Non-kompromis

Jika Anda mengajukan suatu keraguan atas moralitas lembaga-lembaga ini, dikatakan dengan tegas bahwa "Anda

adalah seorang pembaharu yang berbahaya, seorang utopian, seorang teoretisi, seorang subversif; Anda akan menghancurkan fondasi yang menjadi dasar masyarakat."

Jika Anda belajar tentang moralitas atau tentang ilmu politik, anda akan menemukan organisasi-organisasi resmi yang menuntut pemerintah senada dengan pikiran ini: "Agar ilmu pengetahuan tidak lagi diajarkan secara eksklusif dari sudut pandang perdagangan bebas (kebebasan, hak milik, dan keadilan) sebagaimana yang terjadi hingga sekarang ini, namun juga, di masa depan, ilmu pengetahuan akan diajarkan secara khusus dari sudut pandang fakta-fakta dan hukum yang mengatur industri nasional Prancis (fakta dan hukum yang bertentangan dengan kebebasan, hak milik, dan keadilan). Agar, dalam posisi-posisi yang diberikan kepadanya oleh pemerintah, sang profesor benar-benar menahan diri untuk sama sekali tidak membahayakan kehormatan dari hukum yang kini berlaku."[1]

Jadi, jika ada sebuah hukum yang menyetujui perbudakan atau monopoli, penindasan atau perampokan, dalam bentuk apa pun, ia tidak pernah boleh dipersoalkan. Karena bagaimana ia bisa dipersoalkan tanpa sekaligus juga merusak kehormatan yang diinspirasikannya? Lebih jauh, moralitas dan ekonomi politik harus diajarkan dari sudut pandang hukum ini; dari pengandaian bahwa ia pasti merupakan hukum yang adil, semata-mata karena ia adalah hukum.

Dampak lain dari penyelewengan hukum yang tragis ini adalah bahwa ia secara berlebihan menganggap penting hasrat dan konflik politik, dan politik pada umumnya.

Saya dapat membuktikan penegasan ini dengan ribuan

---

1 Pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Jenderal Pabrikan, Pertanian, dan Perdagangan pada 6 Mei 1850.

cara. Namun, sebagai ilustrasi, saya akan membatasi diri pada persoalan yang belakangan ini menyibukkan pikiran setiap orang: hak pilih universal.

Siapa yang Menilai?

Para pengikut aliran pikiran Rousseau—yang menganggap diri mereka sangat maju, namun yang saya anggap ketinggalan dua puluh abad—tidak akan setuju dengan saya menyangkut masalah ini. Namun hak pilih universal—dalam pengertiannya yang paling ketat—bukan merupakan dogma sakral yang ketika kita kaji atau ragukan kita lalu dianggap melakukan kejahatan. Dalam kenyataannya, keberatan yang serius bisa dikemukakan dalam kaitannya dengan hak pilih universal ini.

Pertama, kata *universal* menyembunyikan suatu kesalahan yang sangat besar. Sebagai contoh, ada 36 juta orang di Prancis. Jadi, untuk membuat hak untuk memilih universal, seharusnya ada 36 juta pemilih. Namun sistem ini hanya mengizinkan 9 juta orang untuk memilih. Tiga dari setiap empat orang disingkirkan. Dan lebih jauh, mereka disingkirkan oleh orang yang keempat. Orang keempat ini mengajukan prinsip *ketidakmampuan* sebagai alasannya untuk menyingkirkan orang-orang lain. Dengan demikian, hak pilih universal berarti hak pilih universal bagi mereka yang mampu. Namun masih ada pertanyaan menyangkut fakta ini: siapa yang mampu? Apakah anak kecil, perempuan, orang gila, dan orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan besar tertentu adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai tidak mampu?

Alasan Pembatasan

Pengkajian yang lebih dekat tentang persoalan ini memperlihatkan kepada kita motif yang menyebabkan hak untuk memilih ini dibuat atas dasar pengandaian tentang ketidak-

mampuan. Motif itu adalah bahwa pemilih atau pemberi suara tidak menjalankan haknya hanya untuk dirinya sendiri saja, melainkan juga untuk setiap orang.

Baik sistem pemilihan yang paling terbuka maupun sistem pemilihan yang paling dibatasi serupa dalam hal ini. Keduanya berbeda hanya dalam hal apa yang ditetapkan sebagai ketidakmampuan. Tapi perbedaan itu tidak pada prinsip, melainkan hanya soal derajat saja.

Jika, sebagaimana yang diandaikan kaum republikan dari aliran pemikiran Yunani dan Romawi, hak untuk memilih muncul bersama dengan kelahiran seseorang, maka akan merupakan suatu ketidakadilan jika orang dewasa melarang perempuan dan anak-anak untuk memilih. Mengapa mereka dilarang? Karena mereka dianggap tidak mampu. Dan mengapa ketidakmampuan menjadi motif penyingkiran? Karena tidak hanya si pemilih yang menanggung konsekuensi pilihannya; karena setiap pilihan menyentuh dan memengaruhi setiap orang di seluruh komunitas tersebut; karena orang-orang dalam komunitas tersebut memiliki hak untuk menuntut suatu perlindungan dari tindakan-tindakan yang padanya kesejahteraan dan eksistensi mereka didasarkan.

Membatasi Hukum

Saya tahu apa yang mungkin dikatakan untuk menjawab hal ini; apa keberatan-keberatannya. Namun ini bukan tempatnya untuk menyelesaikan kontroversi ini. Di sini saya hanya ingin melihat bahwa kontroversi tentang hak pilih universal ini (serta sebagian besar persoalan politik yang lain) yang mengguncang, menggairahkan, dan menghancurkan bangsa-bangsa, akan kehilangan hampir seluruh arti-pentingnya jika hukum tetap menjadi apa yang seharusnya.

Dalam kenyataan, jika hukum dibatasi hanya untuk

melindungi semua orang, semua kebebasan, dan semua hak milik; jika hukum tidak lebih dari kumpulan hak individu atas pertahanan diri yang terorganisasi; jika hukum adalah rintangan, perlindungan, penghukum semua penindasan dan perampasan—apakah mungkin bahwa kita warga negara akan berselisih tentang tingkat hak suara tersebut?

Dalam keadaan ini, apakah mungkin bahwa tingkat hak untuk memilih akan membahayakan kedamaian masyarakat, sesuatu yang paling kita hargai itu? Apakah mungkin bahwa kelompok-kelompok yang disingkirkan akan menolak untuk menunggu dengan damai datangnya hak mereka untuk memilih? Apakah mungkin bahwa mereka yang memiliki hak untuk memilih akan mempertahankan privilese mereka secara culas?

Jika hukum dibatasi pada fungsi-fungsinya yang tepat, kepentingan setiap orang dalam hukum tersebut akan sama. Tidakkah jelas bahwa, dalam keadaan-keadaan ini, mereka yang memberikan suara tidak dapat menyulitkan mereka yang tidak memberikan suara?

Ide Fatal Perampasan Legal

Namun di sisi lain, bayangkan bahwa prinsip fatal ini diajukan: Dengan dalih organisasi, regulasi, perlindungan, atau pengobaran semangat, hukum mengambil hak milik dari satu orang dan memberikannya kepada orang lain; hukum mengambil kekayaan semua orang dan memberikannya kepada beberapa orang—apakah itu para petani, pekerja, pemilik kapal, seniman, atau pelawak. Dalam keadaan ini, jelas setiap kelompok akan berkeinginan untuk merebut hukum tersebut, dan secara logis memang demikian.

Kelompok-kelompok yang disingkirkan akan menuntut dengan keras hak mereka untuk memilih—dan akan meng-

hancurkan masyarakat ketimbang tidak mendapatkan hak itu. Bahkan para pengemis dan gelandangan akan membuktikan pada Anda bahwa mereka juga memiliki hak yang tak-tersangkal untuk memilih. Mereka akan bilang pada Anda:

“Kami tidak dapat membeli anggur, tembakau, atau garam tanpa membayar pajak. Dan sebagian dari pajak yang kami bayarkan itu diberikan oleh hukum—dalam bentuk privilese dan subsidi—kepada orang-orang yang lebih kaya ketimbang kami. Orang-orang lain menggunakan hukum untuk menaikkan harga roti, daging, besi, atau pakaian. Jadi, karena setiap orang yang lain menggunakan hukum demi keuntungannya sendiri, kami juga akan menggunakan hukum demi keuntungan kami sendiri. Kami menuntut dari hukum *hak keringanan pajak,* yang merupakan perampasan terhadap orang miskin. Untuk mendapatkan hak ini, kami juga harus menjadi pemilih dan pembuat hukum agar kami bisa mengorganisasi Kepengemisan dalam skala besar bagi kelas kami sendiri, sebagaimana Anda telah mengorganisasi Proteksi dalam skala besar bagi kelas Anda. Kini jangan bilang kepada kami para pengemis ini bahwa Anda akan bertindak bagi kami, dan kemudian melemparkan kepada kami, sebagaimana yang ditawarkan Mr. Mimerel, 600.000 franc agar kami diam saja, seperti melemparkan tulang saja untuk kami gerogoti. Kami memiliki klaim-klaim lain. Dan bagaimanapun, kami ingin tawar-menawar untuk diri kami sendiri sebagaimana kelas-kelas lain tawar-menawar untuk diri mereka sendiri!”

Dan apa yang dapat Anda katakan untuk menjawab argumen itu!

Hukum Menyimpang Sebabkan Konflik

Sejauh diakui bahwa hukum mungkin disimpangkan dari tujuan sejatinya—bahwa ia mungkin melanggar alih-alih

melindunginya—maka setiap orang akan berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembuatan hukum, atau untuk melindungi diri mereka terhadap perampasan atau memanfaatkannya untuk merampas. Persoalan-persoalan politik akan selalu merugikan, dominan, dan menyedot-kering semua hal. Akan ada perselisihan di lembaga legislatif, dan pertempuran di dalamnya tidak kalah panas. Untuk mengetahui hal ini, hampir tidak perlu mengkaji apa yang terjadi di dalam badan legislatif Prancis dan Inggris; memahami persoalan ini saja sudah berarti mengetahui jawabannya.

Apakah ada kebutuhan untuk membuktikan bahwa penyimpangan hukum yang busuk ini selalu merupakan sumber kebencian dan perpecahan; bahwa hal ini cenderung menghancurkan masyarakat itu sendiri? Jika bukti tersebut dibutuhkan, lihat Amerika Serikat [pada 1850]. Tidak ada negeri di dunia di mana hukum lebih dibatasi dalam wilayahnya yang tepat: perlindungan terhadap kebebasan dan hak milik setiap orang. Sebagai akibatnya, tampak tidak ada negeri di dunia ini di mana tatanan sosial bersandar pada fondasi yang lebih kuat. Namun bahkan di Amerika Serikat ada dua isu—dan hanya dua—yang selalu membahayakan kedamaian masyarakat.

Perbudakan dan Cukai

Apakah dua isu tersebut? Dua isu itu adalah perbudakan dan cukai. Hanya dalam kedua isu ini—bertentangan dengan semangat umum republik Amerika Serikat—hukum memperlihatkan watak seorang perampas.

Perbudakan adalah suatu pelanggaran—yang berdasarkan hukum—atas kebebasan. Cukai protektif adalah pelanggaran—yang berdasarkan hukum—atas hak milik.

Adalah fakta yang paling mencolok bahwa kedua *kejahatan legal* ini—warisan menyedihkan dari Dunia Lama—meru-

pakan satu-satunya isu yang dapat, dan mungkin akan, menyebabkan runtuhnya Amerika Serikat. Memang mustahil untuk membayangkan, dalam inti sebuah masyarakat, suatu fakta yang lebih mengejutkan ketimbang ini: *Hukum telah menjadi sebuah instrumen ketidakadilan*. Dan jika kenyataan ini memunculkan akibat yang mengerikan bagi Amerika Serikat—di mana tujuan hukum yang tepat telah disimpangkan hanya dalam kaitannya dengan perbudakan dan cukai—apa akibat yang akan muncul di Eropa, di mana penyimpangan hukum merupakan suatu prinsip, suatu sistem?

Dua Jenis Penyimpangan

Mr. de Montalembert [politisi dan penulis] yang mengambil pemikiran yang ada dalam proklamasi Mr. Carlier yang terkenal, mengatakan: "Kita harus berperang melawan sosialisme." Menurut definisi sosialisme yang diajukan oleh Mr. Charles Dupin, ia memaksudkan: "Kita harus berperang melawan perampasan."

Namun perampasan apa yang ia bicarakan? Karena ada dua jenis perampasan: legal dan ilegal.

Saya beranggapan bahwa perampasan ilegal, seperti pencurian dan penipuan—yang didefinisikan, diantisipasi, dan diberi hukuman oleh hukum pidana—tidak dapat disebut sosialisme. Bukan jenis perampasan seperti ini yang secara sistematis mengancam fondasi masyarakat. Bagaimanapun, perang melawan jenis perampasan ini tidak menunggu komando orang-orang terpandang. Perang melawan perampasan ilegal tersebut telah dilakukan sejak awal dunia ini. Jauh sebelum Revolusi Februari 1848—bahkan jauh sebelum munculnya sosialisme itu sendiri—Prancis telah menyediakan polisi, hakim, jaksa, penjara, penjara bawah tanah, dan tiang gantungan untuk memerangi perampasan ilegal tersebut.

Hukum sendiri menjalankan peran ini, dan merupakan keinginan dan opini saya bahwa hukum hendaknya selalu memelihara sikap yang sama terkait dengan perampasan ini.

Hukum Membela Perampasan

Namun hukum tidak selalu bersikap demikian. Kadang hukum membela perampasan dan berpartisipasi di dalamnya. Demikianlah mereka yang diuntungkan hukum itu diselamatkan dari rasa malu, bahaya, dan penyesalan yang semestinya ditimbulkan oleh tindakan-tindakan mereka. Kadang hukum menempatkan seluruh aparat hakim, polisi, penjara, dan jaksa untuk mendukung para perampas, dan mengancam si korban—saat ia membela diri—sebagai seorang penjahat. Pendeknya, ada *perampasan legal*, dan tak diragukan menyangkut hal inilah Mr. de Montalembert berbicara.

Perampasan legal ini mungkin hanya merupakan suatu noda tersendiri di antara produk-produk legislatif rakyat. Jika demikian, yang terbaik adalah menghapusnya dengan perkataan dan kutukan sesedikit mungkin—ketimbang mengoar-koarkan kepentingan pribadi tersebut.

Mengenali Perampasan Legal

Namun bagaimana perampasan legal ini dikenali? Sangat sederhana. Lihat apakah hukum mengambil dari sebagian orang apa yang menjadi milik mereka, dan memberikannya kepada orang-orang lain yang tidak memiliki hak atasnya. Lihat apakah hukum tersebut menguntungkan satu warga negara dan mengorbankan orang lain dengan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri tanpa melakukan kejahatan.

Maka hapus hukum ini segera, karena ia tidak saja kejahatan itu sendiri, melainkan juga merupakan sumber utama bagi

kejahatan-kejahatan lain karena ia memancing pembalasan dendam. Jika hukum tersebut—yang mungkin merupakan suatu kasus tersendiri—tidak dihapuskan segera, ia akan menyebar luas, berlipat-ganda, dan berkembang menjadi sebuah sistem.

Orang yang mendapatkan keuntungan dari hukum ini akan mengeluhkan penghapusan ini, mempertahankan hak-hak yang telah didapatkannya tersebut. Ia akan mengklaim bahwa negara wajib melindungi dan mendorong industri khususnya; bahwa prosedur ini memperkaya negara karena industri yang dilindunginya dengan demikian mampu mengeluarkan uang lebih banyak dan membayar gaji yang lebih tinggi kepada para pekerja yang miskin.

Jangan mendengarkan cara berpikir menyesatkan yang berdasarkan atas kepentingan pribadi ini. Penerimaan atas argumen-argumen ini akan membuat perampasan legal menjadi sebuah sistem total. Dalam kenyataan, hal ini telah terjadi. Khayalan itu adalah sebuah usaha untuk memperkaya setiap orang dengan mengorbankan setiap orang yang lain; untuk menjadikan perampasan universal dengan dalih mengorganisasikannya.

Banyak Nama Perampasan Legal

Kini, perampasan legal bisa dilakukan dengan cara yang tak terbatas. Demikianlah kita memiliki jumlah rencana yang tak terbatas untuk mengorganisasikannya: cukai, proteksi, keuntungan, subsidi, dorongan, pajak progresif, sekolah negeri, jaminan pekerjaan, jaminan keuntungan, upah minimum, hak atas keringanan pajak, hak atas alat-alat kerja, kredit bebas, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua rencana ini sebagai sebuah keseluruhan—dengan tujuan bersama perampasan legal—adalah sosialisme.

Kini, karena dalam definisi ini sosialisme adalah sekumpulan doktrin, serangan apa yang dapat dibuat terhadap hal ini selain perang doktrin? Jika anda menganggap doktrin sosialis ini salah, absurd, dan jahat, maka sangkallah. Dan semakin salah, semakin absurd, semakin jahat ia, maka ia akan lebih mudah disangkal. Selain itu, jika Anda ingin kuat, mulai dengan menyingkirkan setiap unsur sosialisme yang mungkin telah menyusup ke dalam legislasi Anda. Ini bukanlah tugas yang mudah.

Sosialisme adalah Perampasan Legal

Mr. de Montalembert telah dituduh berkeinginan memerangi sosialisme dengan menggunakan kekuatan yang brutal. Ia seharusnya dibebaskan dari tuduhan ini, karena ia telah berkata dengan jelas: "Perang yang harus kita jalankan melawan sosialisme harus selaras dengan hukum, kehormatan, dan keadilan."

Namun mengapa Mr. de Montalembert tidak melihat bahwa ia telah menempatkan dirinya dalam sebuah lingkaran setan? Anda akan menggunakan hukum untuk melawan sosialisme? Namun sosialisme itu sendiri didasarkan pada hukum. Kaum sosialis ingin mempraktikkan perampasan *legal*, bukan perampasan *ilegal*. Kaum sosialis, seperti kaum monopolis yang lain, ingin menjadikan hukum sebagai senjata mereka. Dan ketika hukum ada di pihak sosialisme, bagaimana ia bisa digunakan untuk melawan sosialisme? Karena ketika perampasan ditopang oleh hukum, ia tidak mencemaskan pengadilan Anda, perwira polisi Anda, dan penjara Anda. Sebaliknya, ia mungkin meminta bantuan mereka.

Untuk mencegah hal ini, Anda akan mencegah sosialisme masuk ke dalam pembuatan undang-undang? Anda akan mencegah kaum sosialis masuk badan legislatif? Anda tidak

akan berhasil—menurut perkiraan saya—sejauh perampasan legal terus menjadi urusan utama badan pembuat undang-undang tersebut. Tidak logis—bahkan absurd—untuk berpikir sebaliknya.

Pilihan yang Ada

Persoalan perampasan legal ini harus dipecahkan secara menyeluruh, dan hanya ada tiga cara untuk memecahkannya:

1. Yang-sedikit merampas yang-banyak.
2. Setiap orang merampas setiap orang.
3. Tak ada yang merampas siapa pun.

Kita harus membuat pilihan di antara perampasan terbatas, perampasan universal, dan tak ada perampasan. Hukum hanya bisa mengikuti salah satu dari ketiga pilihan ini.

Perampasan legal terbatas: Sistem ini berlaku ketika hak untuk memilih dibatasi. Orang akan kembali pada sistem ini untuk mencegah invasi sosialisme.

Perampasan legal universal: Kita terancam oleh sistem ini sejak hak pilih dijadikan universal. Mayoritas yang baru mendapatkan hak pilihnya tersebut memutuskan untuk merumuskan hukum berdasarkan prinsip perampasan legal yang sama yang telah digunakan oleh para pendahulu mereka saat hak pilih tersebut dibatasi.

Tak ada perampasan legal: Ini adalah prinsip keadilan, perdamaian, keteraturan, stabilitas, harmoni, dan logika. Hingga hari kematian saya, saya akan mendukung prinsip ini dengan semua kekuatan paru-paru saya (yang sayangnya sangat tidak memadai!).[2]

---

2 Catatan penerjemah Foundation for Economic Education (FEE): Pada masa tulisan ini ditulis, Bastiat tahu bahwa ia sekarat karena tuberkulosis. Dalam satu tahun, ia akan meninggal dunia.

Fungsi Hukum yang Tepat

Dan, dengan sepenuh ketulusan, dapatkah sesuatu yang lebih dari tidak adanya perampasan diharapkan dari hukum? Dapatkah hukum—yang niscaya mengharuskan penggunaan paksaan—secara rasional digunakan untuk apa pun kecuali melindungi hak-hak setiap orang? Saya menantang siapa pun untuk memperluasnya melebihi tujuan ini tanpa menyimpangkannya dan, sebagai akibatnya, membelokkannya untuk melawan hak. Ini adalah penyimpangan sosial yang paling fatal dan paling tidak logis yang mungkin dapat dibayangkan. Harus diakui bahwa solusi yang sejati—sejauh dicari dalam wilayah hubungan sosial—terkandung dalam kata-kata sederhana berikut: *Hukum adalah keadilan yang terorganisasi.*

Kini hal ini harus dikatakan: Ketika keadilan diorganisasi oleh hukum—yakni, oleh kekuatan/paksaan—hal ini menyingkirkan gagasan tentang menggunakan hukum (paksaan) untuk mengorganisasi segala aktivitas manusia, apakah itu kerja, derma, pertanian, perdagangan, industri, pendidikan, seni, atau agama. Pengorganisasian oleh hukum atas salah satu dari aktivitas ini jelas akan menghancurkan organisasi yang esensial tersebut—yakni keadilan. Karena tentu saja, bagaimana kita dapat membayangkan kekuatan yang digunakan melawan kebebasan warga negara yang tak memilikinya juga digunakan untuk melawan keadilan, dan dengan demikian bertindak melawan tujuannya yang tepat?

Godaan Sosialisme

Di sini saya menemukan kesalahan paling umum dari zaman kita. Dianggap tidak memadai bahwa hukum harus adil; ia harus filantropis. Juga tidak memadai bahwa hukum harus menjamin setiap warga negara penggunaan kemampuan-kemampuannya secara bebas dan tidak-ofensif untuk

pengembangan intelektual, fisik, dan moral diri masing-masing. Sebaliknya, ada tuntutan bahwa hukum harus secara langsung memperluas kesejahteraan, pendidikan, dan moralitas di seluruh negeri.

Inilah daya tarik sosialisme yang begitu menggoda. Dan saya ulangi lagi: Kedua penggunaan hukum ini saling bertentangan secara langsung satu sama lain. Kita harus memilih salah satu di antaranya. Seorang warga negara tidak mungkin pada saat yang bersamaan bebas dan tidak-bebas.

Persaudaraan yang Dipaksakan

Mr. de Lamartine pernah menulis kepada saya berikut ini: "Doktrin Anda hanya setengah dari program saya. Anda berhenti pada kebebasan; saya bergerak lebih jauh pada persaudaraan." Saya jawab: "Setengah kedua program Anda akan menghancurkan setengah yang pertama."

Dalam kenyataan, mustahil bagi saya untuk memisahkan kata *persaudaraan* dari kata *sukarela*. Saya tidak mungkin bisa memahami bagaimana persaudaraan dapat diteguhkan *secara legal* tanpa *secara legal* merusak kebebasan, dan dengan demikian keadilan *secara legal* dinjak-injak.

Perampasan legal memiliki dua akar: salah satunya, seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, adalah dalam ketamakan manusia; yang lain ada dalam filantropi yang salah.

Pada titik ini, saya berpikir bahwa saya harus menjelaskan dengan tepat apa yang saya maksud dengan kata *perampasan.*[3]

---

3 Catatan penerjemah FEE: kata Prancis yang digunakan oleh Bastiat adalah *spoliation, plunder* dalam bahasa Inggris.

Perampasan Melanggar Kepemilikan

Saya tidak menggunakan, sebagaimana yang seringkali terjadi, kata tersebut dalam pengertian yang kabur, tidak pasti, kira-kira, atau metaforis. Saya menggunakannya dalam pengertian ilmiah—sebagai kata yang mengungkapkan gagasan yang berlawanan dengan gagasan tentang hak milik [upah, tanah, uang, atau apa pun]. Ketika sebagian kekayaan ditransfer dari orang yang memilikinya—tanpa persetujuannya dan tanpa kompensasi, dan apakah dengan paksaan atau dengan penipuan—kepada siapa pun yang tidak memilikinya, maka saya mengatakan bahwa hak milik dilanggar; bahwa suatu tindak perampasan dilakukan.

Menurut saya tindakan ini adalah tindakan yang seharusnya dihentikan oleh hukum, selalu dan di mana pun. Ketika hukum itu sendiri melakukan tindakan yang seharusnya ia larang ini, maka perampasan masih dilakukan, dan dari sudut pandang masyarakat dan kesejahteraan, menurut saya agresi terhadap hak-hak ini bahkan lebih buruk. Dalam kasus perampasan legal ini, orang yang menerima keuntungan tidak bertanggung jawab atas tindak perampasan tersebut. Tanggung jawab terhadap perampasan legal ini ada pada hukum, pembuat UU, dan masyarakat itu sendiri. Dalam hal inilah terletak bahaya politik.

Perlu disesali bahwa kata *perampasan* itu ofensif. Saya telah berusaha keras untuk menemukan sebuah kata yang tidak ofensif, karena saya kapan pun—khususnya sekarang—tidak akan berkeinginan untuk menambahkan suatu kata yang menjengkelkan pada perselisihan kita. Jadi, apakah saya yakin atau tidak, saya menyatakan bahwa saya tidak bermaksud menyerang intensi atau moralitas siapa pun. Sebaliknya, saya menyerang sebuah *gagasan* yang saya anggap salah; sebuah *sistem* yang tampak bagi saya sebagai tidak adil; sebuah keti-

dakadilan yang begitu tak bergantung pada intensi personal hingga masing-masing dari kita mendapat keuntungan darinya tanpa berkeinginan untuk berbuat demikian, dan menderita karenanya tanpa tahu sebab penderitaan itu.

Tiga Sistem Perampasan

Ketulusan mereka yang mendukung proteksionisme, sosialisme, dan komunisme di sini tidak dipersoalkan. Seorang penulis yang melakukan hal itu pasti dipengaruhi oleh suatu semangat politik atau suatu kecemasan politik. Namun harus ditunjukkan bahwa proteksionisme, sosialisme, dan komunisme pada dasarnya adalah tanaman yang sama dalam tiga tahap pertumbuhan yang berbeda. Apa yang dapat dikatakan adalah bahwa perampasan legal lebih terlihat dalam komunisme karena ia merupakan perampasan yang menyeluruh; dan dalam proteksionisme karena perampasan tersebut terbatas pada kelompok-kelompok dan industri-industri tertentu.[4] Dengan demikian ini berarti bahwa, dari ketiga sistem tersebut, sosialisme adalah sistem yang paling kabur, paling tidak tegas dan, akibatnya, tahap perkembangan yang paling tulus.

Namun tulus atau tidak tulus, intensi orang tidak dipermasalahkan di sini. Saya telah mengatakan bahwa perampasan legal sebagian didasarkan pada filantropi, meskipun ini adalah

---

4 Jika privilese khusus perlindungan pemerintah terhadap kompetisi—monopoli—hanya diberikan kepada satu kelompok di Prancis, para pekerja besi, misalnya, tindakan ini sangat jelas akan merupakan perampasan legal hingga ia tidak dapat berlangsung lama. Karena alasan inilah kita melihat semua perdagangan yang dilindungi berpadu dalam perjuangan yang sama. Mereka bahkan mengorganisasi diri mereka sedemikian rupa sehingga tampak mewakili semua orang yang adalah pekerja. Secara instingtif, mereka merasa bahwa perampasan legal tersembunyikan dengan menggeneralisasinya.

filantropi yang salah.

Dengan penjelasan ini, mari kita mengkaji nilai—asal-usul dan kecenderungan—aspirasi umum yang mengklaim mencapai kesejahteraan bersama dengan perampasan umum ini.

Hukum adalah Paksaan

Karena hukum mengorganisasi keadilan, kaum sosialis bertanya mengapa hukum tidak juga mengorganisasi kerja, pendidikan, dan agama.

Mengapa hukum tidak digunakan untuk tujuan-tujuan ini? Karena ia tidak dapat mengorganisasi kerja, pendidikan, dan agama tanpa menghancurkan keadilan. Kita harus ingat bahwa hukum adalah paksaan, dan bahwa, sebagai akibatnya, fungsi hukum yang tepat tidak dapat secara sah diperluas melebihi fungsi-fungsi paksaan yang tepat.

Ketika hukum dan paksaan menjaga seseorang di dalam batas-batas keadilan, mereka tidak membebankan apa pun kecuali negasi belaka. Mereka hanya mewajibkan orang itu untuk tidak merugikan orang lain. Mereka tidak melanggar kepribadiannya, kebebasannya, dan hak miliknya. Mereka melindungi semua ini. Mereka *bersifat melindungi*; mereka secara sama melindungi hak-hak semua orang.

Hukum adalah Konsep Negatif

Tidak-berbahayanya misi yang dijalankan oleh hukum dan pembelaan yang berdasar hukum sangat jelas; kegunaannya juga jelas; dan legitimasinya tidak dapat diperselisihkan.

Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh salah seorang teman saya, konsep hukum negatif ini demikian benar sehingga pernyataan, *tujuan hukum adalah menjadikan keadilan berdaulat,* bukan merupakan pernyataan yang akurat.

Seharusnya dinyatakan bahwa *tujuan hukum adalah mencegah bercokolnya ketidakadilan.* Dalam kenyataan, ketidakadilanlah, dan bukan keadilan, yang memiliki eksistensi sendiri. Keadilan dicapai hanya ketika ketidakadilan tak ada.

Namun ketika hukum, dengan sarana dasarnya, yakni paksaan, membebankan pada manusia suatu peraturan tentang kerja, suatu metode atau pokok pendidikan, suatu keyakinan atau kepercayaan keagamaan—maka hukum tersebut tidak lagi negatif; ia bertindak secara positif pada orang-orang. Ia mengganti kehendak orang-orang tersebut dengan kehendak pembuat hukum; mengganti keinginan orang-orang tersebut dengan keinginan pembuat hukum. Ketika hal ini terjadi, orang-orang tidak lagi perlu berunding, membandingkan, merencanakan ke depan; hukum melakukan semua ini untuk mereka. Inteligensi menjadi sesuatu yang tidak berguna bagi orang-orang itu; mereka berhenti menjadi manusia; mereka kehilangan kepribadian, kebebasan, dan hak milik mereka.

Cobalah membayangkan suatu regulasi kerja yang dijalankan dengan paksaan yang bukan merupakan suatu pelanggaran kebebasan; suatu pemindahan kekayaan yang dijalankan dengan paksaan yang bukan merupakan suatu pelanggaran hak milik. Jika Anda tidak dapat mendamaikan kontradiksi ini, maka Anda harus menyimpulkan bahwa hukum tersebut tidak dapat mengorganisasi kerja dan industri tanpa mengorganisasi ketidakadilan.

Pendekatan Politik

Ketika seorang politisi melihat masyarakat dari kantornya yang terpencil, ia tertampar oleh pemandangan ketidaksetaraan yang ia lihat. Ia menyesalkan tercerabutnya hak yang dialami oleh begitu banyak saudara kita itu, ketercerabutan hak yang bahkan tampak lebih menyedihkan saat dibandingkan dengan

kemewahan dan kekayaan.

Mungkin politisi tersebut harus bertanya pada dirinya sendiri apakah keadaan ini tidak disebabkan oleh penaklukan dan perampokan lama, dan oleh perampasan legal yang terjadi sekarang ini. Mungkin ia harus mempertimbangkan proposisi ini: Karena semua orang mencari kesejahteraan dan kesempurnaan, tidakkah suatu kondisi keadilan memadai untuk menyebabkan usaha terbesar ke arah kemajuan, dan kesetaraan yang sebesar mungkin yang sesuai dengan tanggung jawab individual? Tidakkah hal ini sesuai dengan konsep tanggung jawab individual yang dikehendaki Tuhan agar umat manusia bisa memilih antara kejahatan dan kebijaksanaan, dan hukuman dan pahala yang diakibatkannya?

Namun sang politisi tidak pernah memikirkan hal ini. Pikirannya terarah pada organisasi, penggabungan, dan perencanaan—yang legal ataupun yang tampaknya legal. Ia berusaha untuk mengobati keburukan tersebut dengan meningkatkan dan mengekalkan suatu hal yang menyebabkan keburukan tersebut: perampasan legal. Kita telah melihat bahwa keadilan adalah sebuah konsep negatif. Adakah salah satu dari tindakan legal positif ini yang tidak mengandung prinsip perampasan?

Hukum dan Derma

Anda berkata: "Ada orang-orang yang tidak memiliki uang," dan Anda menoleh ke hukum. Namun hukum itu bukan payudara yang mengisi dirinya sendiri dengan susu. Urat susu dari hukum juga tidak memasok susu dari suatu sumber di luar masyarakat. Tidak ada sesuatu yang bisa dianggap masuk harta publik yang menguntungkan satu warga negara atau satu kelompok kecuali jika warga negara lain dan kelompok lain *dipaksa* untuk memasukkannya ke dalamnya.

Jika setiap orang menarik dari harta tersebut jumlah yang telah ia masukkan ke dalamnya, maka benar bahwa hukum dengan demikian tidak merampas siapa pun. Namun prosedur ini tidak ada artinya bagi orang-orang yang tidak memiliki uang. Ia tidak mendorong kesetaraan pendapatan. Hukum dapat menjadi instrumen penyetaraan hanya ketika ia mengambil dari sebagian orang dan memberikannya kepada orang lain. Ketika hukum melakukan hal ini, ia merupakan instrumen perampasan.

Dengan memikirkan hal ini, coba kajilah cukai protektif, subsidi, jaminan keuntungan, jaminan pekerjaan, berbagai skema keringanan dan kesejahteraan, pendidikan publik, perpajakan progresif, kredit bebas, dan pekerjaan publik. Anda akan melihat bahwa itu semua selalu didasarkan pada perampasan legal, ketidakadilan yang terorganisasi.

Hukum dan Pendidikan

Anda berkata: "Ada orang-orang yang tidak terdidik" dan Anda menoleh ke hukum. Namun hukum, pada dirinya sendiri, bukan suluh pendidikan yang menerangi semua. Hukum terentang dalam masyarakat di mana sebagian orang memiliki pengetahuan dan sebagian yang lain tidak; di mana sebagian warga perlu belajar, dan sebagian yang lain bisa mengajar. Dalam masalah pendidikan ini, hukum hanya memiliki dua pilihan: Ia bisa mengizinkan transaksi pengajaran-dan-pembelajaran ini untuk beroperasi secara bebas dan tanpa penggunaan paksaan, atau ia dapat memaksa keinginan manusia dalam hal ini dengan meminta sebagian dari mereka membayar para guru yang diangkat oleh pemerintah untuk mengajar orang lain, gratis. Namun dalam kasus kedua ini, hukum melakukan perampasan legal dengan melanggar kebebasan dan hak milik.

Hukum dan Moral

Anda berkata: “Ada orang-orang yang tidak memiliki moralitas atau agama,” dan Anda menoleh ke hukum. Namun hukum adalah paksaan. Dan perlukah saya menunjukkan betapa buruk dan sia-sianya upaya memaksakan suatu moralitas dan agama?

Akan tampak bahwa kaum sosialis, betapapun puasnya ia dengan diri sendiri, tidak akan dapat mengelak untuk menyaksikan perampasan legal yang begitu mencolok ini, yang merupakan akibat dari sistem dan upaya pemaksaan itu. Namun apa yang dilakukan oleh kaum sosialis? Mereka dengan pintar membungkus perampasan legal ini dari pihak lain—dan bahkan dari diri mereka sendiri—dengan nama-nama yang menggoda: persaudaraan, persatuan, organisasi, dan asosiasi. Karena kita meminta sangat sedikit dari hukum—hanya keadilan—kaum sosialis lalu menuduh kita menolak persaudaraan, persatuan, organisasi, dan asosiasi. Kaum sosialis mencap kita dengan nama *individualis.*

Namun kita pastikan pada kaum sosialis bahwa yang kita tolak hanyalah organisasi yang *dipaksakan*, bukan organisasi alamiah. Kita menolak bentuk-bentuk asosiasi yang *dipaksakan* kepada kita, bukan asosiasi sukarela. Kita menolak persaudaraan yang *dipaksakan*, bukan persaudaraan sejati. Kita menolak persatuan *palsu* yang hanya memberangus tanggung jawab individual dari orang-orang. Kita tidak menolak persatuan alamiah umat manusia di bawah Tuhan.

Pencampuradukan Istilah

Sosialisme, seperti gagasan-gagasan kuno yang menjadi sumbernya, mencampuradukkan distingsi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai akibatnya, setiap kali kita keberatan terhadap sesuatu yang dilakukan pemerintah, kaum sosialis

berkesimpulan bahwa kita pasti selalu berkeberatan dengan semua upaya mereka.

Kita tidak setuju dengan pendidikan yang dikendalikan negara. Maka kaum sosialis berkata bahwa kita menentang segala jenis pendidikan. Kita keberatan terhadap agama yang dikendalikan negara. Maka kaum sosialis berkata bahwa kita sama sekali tidak menginginkan agama. Kita keberatan terhadap kesetaraan yang dipaksakan negara. Maka mereka berkata bahwa kita menentang kesetaraan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Seolah-olah kaum sosialis hendak menuduh kita tidak ingin manusia makan karena kita tidak ingin negara menanam gandum.

Pengaruh Para Penulis Sosialis

Bagaimana para politisi percaya pada gagasan aneh bahwa hukum dapat dibuat menghasilkan apa yang tidak dikandungnya—kekayaan, ilmu pengetahuan, dan agama yang, dalam pengertian positif, merupakan kemakmuran? Apakah ini karena pengaruh para penulis persoalan publik modern?

Para penulis sekarang ini—khususnya mereka yang berasal dari aliran pemikiran sosialis—mendasarkan berbagai teori mereka pada satu hipotesis umum: Mereka membagi umat manusia menjadi dua bagian. Orang-orang pada umumnya—dengan pengecualian si penulis itu sendiri—membentuk kelompok pertama. Para penulis itu termasuk dalam kelompok kedua dan paling penting. Jelas ini adalah gagasan yang paling aneh dan sombong yang ada dalam pikiran manusia!

Dalam kenyataan, para penulis persoalan publik ini mulai dengan mengandaikan bahwa orang-orang pada umumnya tidak memiliki sarana kecerdasan dalam diri mereka sendiri; tidak memiliki motivasi untuk bertindak. Para penulis ini mengasumsikan bahwa orang adalah materi yang lamban,

partikel yang pasif, atom-atom yang mandek, dan paling baik suatu jenis tumbuhan yang acuh-tak-acuh terhadap cara bereksistensinya sendiri. Mereka beranggapan bahwa orang-orang pada umumnya mudah dibentuk—sesuai dengan kehendak dan tangan orang lain—menjadi beragam bentuk yang tak terbatas, yang kurang lebih simetris, artistik, dan sempurna.

Lebih jauh, tidak satu pun dari para penulis persoalan pemerintah ini yang ragu-ragu untuk membayangkan bahwa dirinya sendiri—dengan jabatan sebagai pengorganisasi, penemu, pembuat hukum, atau pendiri—adalah kehendak dan tangan tersebut, kekuatan motivatif yang universal, kekuatan kreatif yang misi agungnya adalah membentuk materi-materi yang terpecah-pecah tersebut—yakni orang-orang—menjadi sebuah masyarakat.

Para penulis sosialis ini melihat orang dengan cara yang sama sebagaimana tukang kebun melihat tanamannya. Sebagaimana si tukang kebun itu seenaknya sendiri membentuk tanaman tersebut menjadi piramida, payung, kubus, bejana, kipas angin, dan bentuk-bentuk lain, demikian juga si penulis sosialis seenaknya sendiri membentuk manusia menjadi kelompok, rangkaian, pusat, sub-pusat, sarang madu, korps-pekerja, dan variasi-variasi yang lain. Dan sebagaimana si tukang kebun membutuhkan kapak, sabit, gergaji, dan sabit untuk membentuk tanamannya, demikian juga si penulis sosialis membutuhkan kekuatan yang hanya dapat ia temukan dalam hukum untuk membentuk manusia. Untuk tujuan ini, ia mencanangkan UU cukai, UU perpajakan, UU tentang keringanan, dan UU sekolah.

Kaum Sosialis Ingin Jadi Tuhan

Kaum sosialis melihat orang sebagai bahan mentah yang

perlu dibentuk ke dalam perpaduan-perpaduan sosial. Hal ini demikian benarnya sehingga jika kebetulan kaum sosialis tersebut memiliki keraguan tentang keberhasilan perpaduan ini, mereka akan meminta sebagian kecil manusia disisihkan untuk *dijadikan bahan eksperimen*. Gagasan populer tentang *mencoba semua sistem* umum dikenal. Dan salah satu pemimpin sosialis diketahui telah secara serius meminta Majelis Konstituen untuk memberinya sebuah distrik kecil dengan semua penduduknya, untuk ia jadikan sebagai bahan eksperimennya.

Dengan cara yang sama, seorang penemu membuat sebuah model sebelum ia membangun mesin yang sesungguhnya; si ahli kimia mencoba-coba bahan-bahan kimia—si petani mencoba-coba beberapa benih dan tanah—untuk memperagakan gagasannya.

Namun betapa berbedanya si tukang kebun dan tanamannya, si penemu dan mesinnya, si ahli kimia dan bahan kimiawinya, si petani dan benihnya! Dan sejujurnya, si sosialis berpikir bahwa ada perbedaan yang sama antara ia dan umat manusia!

Tidak mengherankan jika para penulis abad ke-19 melihat masyarakat sebagai sebuah ciptaan artifisial dari genius pembuat hukum. Gagasan ini—hasil dari pendidikan klasik—telah melingkupi semua intelektual dan penulis terkenal negeri kita. Bagi para intelektual dan penulis ini, hubungan antara orang dan pembuat hukum tampak sama seperti hubungan antara lempung dan pembuat pot.

Lebih jauh, bahkan ketika mereka setuju untuk mengakui suatu prinsip tindakan dalam hati manusia—dan suatu prinsip kecerdasan dalam intelek manusia—mereka menganggap berkah dari Tuhan ini sebagai berkah yang berbahaya. Mereka berpikir bahwa manusia, dengan dorongan kedua berkah ini, akan cenderung menghancurkan diri mereka sendiri

secara fatal. Mereka beranggapan bahwa jika para pembuat hukum membiarkan orang-orang tersebut bebas mengikuti kecenderungan mereka sendiri, mereka akan tiba pada ateisme ketimbang agama, kebodohan ketimbang pengetahuan, kemiskinan ketimbang produksi dan pertukaran.

Kaum Sosialis Memandang Rendah Manusia

Menurut para penulis ini, memang beruntung bahwa Tuhan menganugerahi beberapa manusia tertentu—para gubernur dan para pembuat hukum—kecenderungan-kecenderungan yang sama sekali berlawanan, bukan hanya demi diri mereka sendiri melainkan demi seluruh dunia! Sementara umat manusia cenderung ke arah kejahatan, para pembuat hukum tersebut sangat menginginkan kebaikan; sementara manusia maju ke arah kegelapan, para pembuat hukum tersebut menginginkan pencerahan; sementara manusia tertarik ke arah kekejaman, para pembuat undang-undang tertarik ke arah kebajikan. Karena mereka telah memutuskan bahwa inilah keadaan yang sejati, mereka kemudian menuntut penggunaan paksaan untuk mengganti kecenderungan-kecenderungan umat manusia tersebut dengan kecenderungan-kecenderungan mereka sendiri.

Bukalah secara acak buku apa pun tentang filsafat, politik, atau sejarah, dan Anda sangat mungkin akan melihat betapa mendalamnya gagasan ini berakar di negeri kita—anak dari studi-studi klasik, ibu dari sosialisme. Dalam semua buku tersebut, Anda sangat mungkin akan menemukan gagasan bahwa manusia hanyalah materi yang mandek, yang menerima hidup, organisasi, moralitas, dan kemakmuran dari kekuasaan negara. Dan bahkan lebih buruk, akan dikemukakan bahwa umat manusia cenderung ke arah degenerasi, dan dihentikan dari kecenderungan menurun ini hanya oleh tangan misterius

si pembuat hukum. Pemikiran klasik konvensional di mana-mana mengatakan bahwa di balik masyarakat yang pasif tersembunyi kekuatan yang disebut *hukum* atau *pembuat undang-undang* (atau disebut dengan beberapa istilah lain yang menunjuk beberapa orang yang tak-dinamai atau orang-orang dengan pengaruh dan otoritas yang mutlak) yang menggerakkan, mengontrol, memberi keuntungan, dan memperbaiki manusia.

Suatu Pembelaan atas Kerja Wajib

Mari kita pertama-tama mempertimbangkan sebuah kutipan dari Bossuet (tutor bagi Dauphin di Pengadilan Louis XIV):

> Salah satu hal yang paling kuat dilekatkan (oleh siapa?) pada pikiran orang-orang Mesir adalah patriotisme . . . *Tak seorang pun diizinkan* tak berguna bagi negara. Hukum memberikan bagi masing-masing orang pekerjaannya, yang dilungsurkan dari ayah ke anak. Tak seorang pun diizinkan memiliki dua profesi. Seseorang juga tak dapat berubah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain . . . Namun ada satu tugas yang terhadapnya semua orang *dipaksa* menyesuaikan diri: studi tentang hukum dan tentang kebijaksanaan. Pengabaian agama dan peraturan-peraturan politik negeri *tidak dimaafkan* dalam keadaan apa pun. Selain itu, setiap pekerjaan *ditetapkan* (oleh siapa?) pada distrik tertentu . . . Di antara berbagai hukum yang bagus tersebut, salah satu yang terbaik adalah bahwa setiap orang *dilatih* (oleh siapa?) untuk mematuhinya. Sebagai akibatnya, Mesir dipenuhi dengan berbagai penemuan luar biasa, dan tidak ada sesuatu yang diabaikan yang dapat membuat hidup mudah dan tenang.

Demikianlah, menurut Bossuet, orang-orang tidak mendapatkan apa pun dari diri mereka sendiri. Patriotisme, kemakmuran, penemuan, pertanian, ilmu pengetahuan—semua ini diberikan kepada orang-orang tersebut oleh kerja hukum, para penguasa. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah tunduk pada kepemimpinan.

Suatu Pembelaan atas Pemerintahan Paternal

Bossuet bahkan menggunakan gagasan tentang negara sebagai sumber semua kemajuan ini untuk membela bangsa Mesir melawan tuduhan bahwa mereka menolak gulat dan musik. Ia berkata:

> Bagaimana itu mungkin? Seni-seni ini ditemukan oleh Trismegistus [yang dianggap Kanselir dewa Mesir Osiris].

Dan sekali lagi di kalangan bangsa Persia, Bossuet mengklaim bahwa semuanya berasal dari atas:

> Salah satu tanggung jawab pertama sang pangeran adalah memajukan pertanian . . . Sebagaimana ada jabatan-jabatan yang dibentuk untuk pengaturan tentara, demikian juga ada jabatan-jabatan untuk mengarahkan kerja pertanian . . . Bangsa Persia *terinspirasi* dengan penghormatan yang berlimpah bagi otoritas kerajaan.

Dan menurut Bossuet, bangsa Yunani, meskipun sangat cerdas, tidak memiliki pengertian tentang tanggung jawab pribadi; seperti anjing dan kuda, mereka sendiri tidak dapat menemukan permainan-permainan yang paling sederhana:

> Bangsa Yunani, yang secara alamiah cerdas dan berani, *pada mulanya dimatangkan oleh* para raja dan penduduk yang datang dari Mesir. Dari para penguasa Mesir ini, bangsa Yunani belajar olah tubuh, *lomba lari*, dan pacuan kuda dan kereta . . . Namun hal terbaik yang telah diajarkan bangsa Mesir kepada bangsa Yunani adalah menjadi patuh, dan membiarkan diri mereka dibentuk oleh hukum demi kebaikan publik.

Gagasan tentang Manusia Pasif

Tidak diragukan bahwa teori-teori klasik [yang diajukan oleh para pengajar, penulis, pembuat hukum, ekonom, dan filosof sekarang ini] menyatakan bahwa segala sesuatu sampai pada orang-orang dari suatu sumber di luar dirinya sendiri. Sebagai contoh lain, lihat Fenelon [uskup agung, pengarang, dan instruktur bagi Duke of Burgundi].

Ia adalah saksi kekuasaan Louis XIV. Hal ini, ditambah kenyataan bahwa ia diajar dalam studi-studi klasik dan kekaguman pada zaman antik, secara alamiah membuat Fenelon menerima gagasan bahwa umat manusia pasti pasif; bahwa kemalangan dan kemakmuran—kejahatan dan kebijaksanaan—orang-orang disebabkan oleh pengaruh eksternal yang dijalankan pada mereka oleh hukum dan pembuat hukum. Demikianlah, dalam karyanya *Utopia of Salentum,* ia menempatkan manusia—dengan semua kepentingan, kemampuan, hasrat, dan kepemilikan mereka—di bawah arahan mutlak pembuat hukum. Apa pun isunya, orang-orang tidak memutuskan untuk diri mereka sendiri; sang pangeran yang memutuskan untuk mereka. Sang pangeran tersebut digambarkan sebagai *jiwa* dari massa orang yang tak-berbentuk yang membentuk bangsa ini. Dalam diri pangeran tersebut bertempat pemikiran, wawasan, semua kemajuan, dan

prinsip semua organisasi. Dengan demikian semua tanggung jawab ada padanya.

Keseluruhan buku kesepuluh Fenelon, *Telemachus,* membuktikan hal ini. Saya menghubungkan pembaca dengan buku ini, dan saya puas mengutip secara acak dari karya terkenal yang amat saya hormati ini.

Kaum Sosialis Mengabaikan Akal Budi dan Fakta

Dengan kepercayaan yang mengagumkan yang khas kaum klasisis, Fenelon mengabaikan otoritas akal budi dan fakta saat ia menganggap kebahagiaan umum bangsa Mesir bukan disebabkan oleh kebijaksanaan mereka sendiri, melainkan oleh kebijaksanaan raja-raja mereka:

> Kita tidak dapat mengalihkan mata kita pada salah satu pantai tanpa melihat kota-kota dan tanah-tanah negeri yang kaya dengan lokasi yang sangat menyenangkan; ladang-ladang, tak pernah tak ditanami, tertutup dengan padi yang menguning setiap tahun; padang rumput yang penuh dengan gembalaan; para pekerja yang membungkuk menggendong beban buah-buahan yang dianugerahkan bumi pada para penanamnya; para penggembala yang membuat gema yang bergaung dengan nada-nada lembut dari pipa dan seruling mereka. "Bahagialah," kata si Penasihat, "bangsa yang dipimpin oleh seorang raja yang bijak . . ."
>
> Kemudian, si Penasihat ingin agar saya mengamati kepuasan dan keberlimpahan yang melingkupi seluruh Mesir, di mana 22 ribu kota berada. Ia mengagumi peraturan-peraturan polisi yang bagus di kota-kota tersebut; keadilan diejawantahkan di pihak yang miskin dan bukan yang kaya; pendidikan anak-anak yang bagus tentang kepatuhan, kerja, ketenangan hati, dan cinta pada seni dan sastra; kecermatan

> dalam menjalankan semua upacara keagamaan; kepedulian pada orang lain, penghargaan yang tinggi pada kehormatan, kepercayaan kepada manusia, dan rasa takut pada para dewa yang diajarkan setiap ayah kepada anak-anaknya. Ia tidak pernah berhenti mengagumi kemakmuran negeri itu. "Bahagialah," katanya, "bangsa yang diperintah secara demikian oleh seorang raja yang bijak."

Kaum Sosialis Ingin secara Ketat Mengatur Orang-orang

Syair Fenelon tentang Kreta bahkan lebih menarik. Si Penasihat berkata:

> Semua yang Anda lihat di pulau yang mengagumkan ini disebabkan oleh hukum-hukum Minos. Pendidikan yang ia perintahkan kepada anak-anak membuat tubuh mereka kuat dan sehat. Sejak dari awal, seseorang membiasakan anak-anak pada sebuah kehidupan yang sederhana dan penuh kerja keras, karena orang menganggap bahwa semua kesenangan inderawi memperlemah tubuh maupun pikiran. Dengan demikian orang tidak mengizinkan kesenangan kecuali kesenangan menjadi kuat karena kebijaksanaan, dan kesenangan mendapatkan keagungan . . . Di sini orang menghukum tiga kejahatan yang tak dihukum di kalangan bangsa lain: rasa tidak berterimakasih, kemunafikan, dan ketamakan. Tidak perlu menghukum orang-orang karena kemewahan dan pemborosan, karena mereka tak dikenal di Kreta . . . Tidak ada perabotan yang mahal, tidak ada pakaian yang terlalu mewah, tidak pesta yang terlalu lezat, tidak ada istana-istana bersepuh yang diperbolehkan.

Demikianlah si Penasihat mempersiapkan pelajarnya untuk membentuk dan memanipulasi—tak diragukan dengan

intensi terbaik—orang-orang Ithaca. Dan untuk meyakinkan pelajar tersebut tentang kebijaksanaan gagasan-gagasan ini, si Penasihat memberi tahunya contoh tentang Salentum.

Dari jenis filsafat seperti inilah kita menerima gagasan-gagasan politik pertama kita! Kita diajar untuk memperlakukan orang-orang sebagaimana seorang instruktur dalam pertanian mengajar para petani untuk mempersiapkan dan merawat tanah.

Sebuah Nama Terkenal dan Sebuah Gagasan Jahat

Kini dengar Montesquieu yang besar berbicara tentang masalah yang sama ini:

> Untuk menjaga semangat perdagangan, perlu ditekankan bahwa semua hukum harus mendukungnya. Hukum-hukum ini, dengan secara proporsional membagi keuntungan yang terbentuk dalam perdagangan, harus memberi setiap warga negara miskin lingkungan yang cukup mudah yang memungkinkannya untuk bekerja seperti warga-warga yang lain. Hukum yang sama ini harus menempatkan setiap warga negara yang kaya dalam lingkungan yang lebih rendah sehingga memaksanya bekerja untuk terus mempertahankan kekayaannya atau mendapatkan keuntungan.

Demikianlah hukum-hukum tersebut membuang semua keberuntungan!

> Meskipun kesetaraan yang nyata adalah jiwa negara dalam sebuah demokrasi, namun hal ini sangat sulit untuk diteguhkan sehingga ketepatan yang ekstrem dalam masalah ini tidak akan selalu dapat diharapkan. Cukup bahwa di sini diteguhkan sebuah sensus untuk mengurangi atau

> memperbaiki perbedaan-perbedaan dalam kekayaan ini dalam suatu batas tertentu. Setelah ini selesai, hukum-hukum tertentu masih diperlukan untuk menyetarakan ketidak-setaraan dengan memberi beban kepada si kaya dan memberi keringanan pada si miskin.

Di sini kita kembali menemukan gagasan tentang menyamakan keberuntungan dengan hukum, dengan paksaan.

Di Yunani, ada dua jenis republik: pertama, Sparta, adalah republik militer; kedua, Athena, adalah republik perdagangan. Pada yang pertama, *diharapkan* bahwa warga negara malas; pada yang kedua, orang *didorong* mencinta kerja.

Lihat kejeniusan mengagumkan dari para pembuat hukum ini: Dengan meremehkan semua adat-kebiasaan yang mapan—dengan mencampur konsep-konsep lazim dari semua kebijaksanaan—mereka tahu sebelumnya bahwa dunia akan mengagumi kebijaksanaan mereka.

Lycurgus memberi stabilitas pada kota Spartanya dengan memadukan pencurian kecil dan jiwa keadilan; dengan memadukan perbudakan paling menyeluruh dan kebebasan paling ekstrem; dengan memadukan keyakinan-keyakinan yang paling keji dan moderasi paling besar. Ia tampak mencabut dari kotanya semua sumber-daya, seni, perdagangan, uang, dan pertahanannya. Di Sparta, ambisi berjalan tanpa harapan balasan materiil. Afeksi alamiah tidak menemukan jalan-keluar karena seorang laki-laki bukan merupakan putra, suami, atau ayah. Bahkan kemurnian (*chastity*) tidak lagi dianggap pantas. *Dengan jalan ini, Lycurgus membawa Sparta pada kebesaran dan kemasyhuran.*

Keberanian yang ditemukan pada lembaga-lembaga Yunani ini telah diulangi di tengah-tengah *degenerasi dan korupsi zaman modern kita*. Seorang pembuat hukum jujur yang amat

jarang ditemukan telah membentuk sebuah bangsa di mana integritas tampak sama alamiahnya seperti keberanian pada bangsa Sparta.

Mr. William Penn, misalnya, adalah seorang Lycurgus sejati. Meskipun Mr. Penn menjadikan perdamaian sebagai tujuannya—sementara Lycurgus menjadikan perang sebagai tujuan—mereka mirip satu sama lain, yakni bahwa penghargaan moral mereka terhadap manusia bebas memungkinkan mereka mengatasi prasangka, menaklukkan nafsu, dan memimpin bangsa *mereka* masing-masing di jalan baru.

Negeri Paraguay memberi kita contoh lain [tentang sebuah bangsa yang, demi kebaikan mereka sendiri, dibentuk oleh para pembuat hukum mereka].[5]

Kini benar bahwa jika seseorang menganggap kenikmatan memerintah merupakan kesenangan terbesar dalam hidup, ia merenungkan sebuah kejahatan terhadap masyarakat; namun, memerintah manusia dalam suatu cara yang akan membuat mereka lebih bahagia akan selalu merupakan suatu cita-cita yang mulia.

Mereka yang ingin membangun lembaga-lembaga yang sama harus berbuat sebagai berikut: Bentuk kepemilikan bersama atas hak milik sebagaimana dalam republik Plato; puja-puji para dewa seperti yang diperintahkan Plato; larang orang asing bercampur baur dengan bangsa tersebut, demi untuk memelihara adat-istiadat; biarkan negara, dan bukan warga negara, membentuk perdagangan. Para pembuat hukum harus memasok seni dan bukan kemewahan; mereka harus memuaskan kebutuhan dan bukan nafsu.

---

5 Catatan penerjemah FEE: Apa yang saat itu dikenal sebagai Paraguay jauh lebih luas dibanding yang ada sekarang ini. Ia dikolonisasi oleh kaum Jesuit yang menempatkan bangsa Indian di desa-desa, dan umumnya melindungi mereka dari berbagai kebrutalan yang dilakukan oleh para penakluk.

Gagasan yang Mengerikan

Mereka yang memiliki kekaguman buta mungkin berseru: “Montesquieu mengatakan hal ini! Jadi ini luar biasa! Ini luhur!” Bagi saya, saya berani mengemukakan pendapat saya sendiri. Saya katakan: Apa! Kau berani mengatakan itu baik? Itu mengerikan! Itu buruk sekali! Kutipan-kutipan acak dari tulisan-tulisan Montesquieu ini memperlihatkan bahwa ia menganggap kedirian, kebebasan, hak milik—kemanusiaan itu sendiri—bukan sebagai apa-apa kecuali bahan-bahan yang dibentuk oleh kebijaksanaan para pembuat hukum.

Pemimpin Para Demokrat

Kini mari kita mengkaji Rousseau tentang persoalan ini. Penulis masalah-masalah publik ini adalah otoritas tertinggi para demokrat. Dan meskipun ia mendasarkan struktur sosial pada *kehendak orang-orang*, ia, sampai tingkat yang lebih besar dibanding penulis lain, sepenuhnya menerima teori tentang kepasifan total manusia di hadapan para pembuat hukum:

> Jika benar bahwa seorang pangeran besar jarang ada, maka tidakkah benar bahwa seorang pembuat hukum yang besar bahkan lebih jarang lagi? Sang pangeran hanya mengikuti pola yang diciptakan sang pembuat hukum. *Si pembuat hukum adalah sang ahli mesin yang menemukan mesin tersebut;* sang pangeran hanya seorang pekerja yang menjalankannya.

Dan peran apa yang dimainkan orang-orang dalam semua ini? Mereka hanyalah mesin yang dijalankan tersebut. Dalam kenyataan, apakah mereka tidak sekadar dianggap sebagai bahan mentah dari mana mesin itu dibuat?

Dengan demikian, hubungan yang hadir antara si pembuat hukum dan si pangeran sama dengan yang hadir antara ahli

pertanian dan petani; dan hubungan antara si pangeran dan warganya sama dengan hubungan antara petani tersebut dan tanahnya. Jadi, betapa tinggi di atas umat manusia penulis tentang persoalan publik ini telah ditempatkan? Rousseau berkuasa atas para pembuat hukum itu sendiri, dan mengajar mereka tentang ketrampilan mereka dalam kalimat-kalimat angkuh berikut ini:

> Akankah Anda memberikan stabilitas kepada negara? Maka rekatkan sedekat mungkin titik-titik yang ekstrem itu. Jangan toleransi orang-orang yang kaya maupun para pengemis.
>
> Jika tanahnya jelek atau tandus, atau negerinya terlalu kecil bagi para penghuninya, maka bawa ke arah industri dan kesenian, dan perdagangkan produk-produk ini dengan makanan yang Anda butuhkan. . . . Jika tanahnya subur—*jika Anda kekurangan* penduduk—curahkan seluruh perhatian Anda pada pertanian, karena hal ini melipatgandakan orang; *larang* kesenian, karena hal ini hanya cenderung mengikis populasi bangsa . . .
>
> Jika Anda memiliki wilayah pantai yang luas dan mudah didatangi, maka *penuhi laut* dengan kapal dagang; Anda akan memiliki eksistensi yang brilian namun pendek. Jika laut Anda hanya melingkupi tebing-tebing karang yang tidak dapat dijangkau, biarkan orang-orang *menjadi barbar* dan makan ikan; mereka akan hidup lebih tenang—mungkin lebih baik—dan, yang paling pasti, mereka akan hidup lebih bahagia.
>
> Pendeknya, dan sebagai tambahan terhadap maksim-maksim yang lazim bagi semua orang, setiap bangsa memiliki lingkungan khasnya sendiri. Dan kenyataan ini pada dirinya sendiri akan membuat legislasi sesuai dengan keadaan-

> keadaan tersebut.
>
> Inilah alasan mengapa bangsa Yahudi pada masa sebelumnya—dan, pada masa sekarang ini, bangsa *Arab*—menjadikan agama sebagai tujuan utama mereka. Tujuan bangsa Athena adalah kesusastraan; bangsa Carthage dan Tyre, perdagangan; dan bangsa Roma, kebijaksanaan. Penulis *The Spirit of Laws* telah memperlihatkan dengan seni apa *si pembuat hukum harus mengarahkan lembaga-lembaganya menuju masing-masing tujuan ini* . . . Namun andaikan bahwa pembuat hukum tersebut salah menentukan tujuannya yang tepat, dan bertindak berdasarkan sebuah prinsip yang berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh watak hal-ihwal? Andaikan bahwa prinsip yang dipilih tersebut kadang menciptakan perbudakan, dan kadang kebebasan; kadang kekayaan, dan kadang populasi; kadang perdamaian, dan kadang penaklukan. Kekacauan tujuan ini perlahan akan memperlemah hukum dan merusak konstitusi tersebut. Negara tersebut akan menghadapi pergolakan yang tiada henti hingga ia hancur atau berubah, dan alam yang tak terkalahkan akan mendapatkan kembali kerajaannya.

Namun jika alam cukup tangguh untuk *mendapatkan kembali* kerajaannya, mengapa Rousseau tidak mengakui bahwa ia tidak membutuhkan si pembuat hukum untuk *mendapatkan* kerajaan tersebut pada awalnya? Mengapa ia tidak melihat bahwa manusia, dengan mematuhi insting-insting mereka sendiri, akan cenderung mengarah untuk bercocok tanam di tanah yang subur, dan untuk berdagang di pantai yang luas dan mudah dijangkau, tanpa campur tangan seorang Lycurgus atau seorang Solon atau seorang Rousseau *yang mungkin bisa dengan mudah salah?*

Kaum Sosialis Ingin Keselarasan yang Dipaksakan

Demikianlah, Rousseau memberikan para pencipta, para pengorganisasi, para pengarah, para pembuat hukum, dan para pengontrol masyarakat suatu tanggung jawab yang mengerikan. Karena itulah ia sangat menuntut pada mereka:

> Ia yang berani menjalankan pembentukan politik sebuah bangsa hendaknya percaya bahwa ia dapat dikatakan bisa mengubah watak-dasar manusia; mengubah tiap-tiap individu—yang, pada dirinya sendiri, merupakan suatu keseluruhan yang khas dan sempurna—menjadi sekadar sebuah bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar yang darinya individu tersebut kemudian mendapatkan hidup dan keberadaannya. Demikianlah orang yang akan melakukan pembentukan politik sebuah bangsa harus percaya pada kemampuannya untuk mengubah keadaan manusia; memperkuatnya; mengganti eksistensi fisik dan independen yang diterima dari alam dengan suatu eksistensi yang bersifat parsial dan moral.[6] Pendeknya, ia yang akan menjadi pembentuk manusia politik tersebut harus membuang kekuatan-kekuatan manusia sendiri dan memberinya kekuatan-kekuatan lain yang secara alamiah asing baginya.

Watak manusia yang malang! Akan menjadi seperti apa kehormatan seseorang jika hal ini dipercayakan kepada para pengikut Rousseau?

---

6 Catatan penerjemah FEE: Menurut Rousseau, eksistensi manusia sosial bersifat parsial dalam pengertian bahwa ia kemudian semata-mata sebuah bagian dari masyarakat. Mengetahui dirinya seperti itu—dan berpikir dan merasa dari sudut pandang keseluruhan tersebut—ia dengan demikian menjadi bersifat moral.

Para Pembuat Hukum Ingin Membentuk Umat Manusia

Kini mari kita mengkaji Raynal dalam kaitannya dengan masalah umat manusia yang dibentuk oleh si pembuat hukum:

> Si pembuat hukum pertama-tama harus mempertimbangkan iklim, udara, dan tanah. Sumber-sumber daya yang ada padanya menentukan kewajibannya. Ia pertama-tama harus mempertimbangkan lokalitas-*nya*. Suatu populasi yang hidup di pantai harus punya hukum yang dirancang untuk navigasi . . . Jika ia adalah perkampungan kepulauan, si pembuat hukum harus membuat rencananya berdasarkan sifat dan kesuburan tanah . . .
>
> Terutama dalam distribusi hak milik kejeniusan si pembuat hukum akan terlihat. Lazimnya, ketika sebuah koloni baru dibentuk di suatu negeri, tanah yang memadai harus diberikan kepada tiap-tiap manusia untuk menopang keluarganya . . .
>
> Di suatu pulau yang tidak digarap yang Anda diami dengan anak-anak, Anda tidak perlu melakukan apa-apa kecuali membiarkan benih-benih kebenaran berkecambah bersama perkembangan akal budi. . . . Namun ketika *Anda* memindahkan sebuah bangsa dengan suatu masa lalu ke sebuah negeri baru, keahlian si pembuat hukum terletak dalam kebijakan *mengizinkan orang-orang* memelihara pandangan-pandangan dan adat-kebiasaan yang utuh yang mungkin bisa diperbaiki. Jika *Anda* ingin mencegah pandangan-pandangan dan adat-kebiasaan ini menjadi permanen, Anda akan melindungi generasi kedua dengan sebuah sistem umum pendidikan publik bagi anak-anak. Seorang pangeran atau seorang pembuat hukum tidak pernah boleh mendirikan sebuah koloni tanpa lebih dulu mengirim orang-orang bijak

untuk mengajar kaum muda . . .

Dalam sebuah koloni baru, cukup ada kesempatan bagi pembuat hukum yang berhati-hati yang ingin *memurnikan adat dan kebiasaan bangsa tersebut.* Jika ia memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan, tanah dan orang-orang *yang ada padanya* akan menginspirasi jiwanya dengan sebuah rencana bagi masyarakat. Seorang penulis hanya dapat secara samar-samar melacak rencana tersebut sebelumnya karena ia niscaya tunduk pada ketidakstabilan semua hipotesis; persoalan ini memiliki banyak bentuk, komplikasi, dan keadaan yang sulit diramalkan dan dipecahkan secara mendetail.

Para Pembuat Hukum Memberitahu Bagaimana Menata Manusia

Perintah-perintah Raynal kepada para pembuat hukum tentang bagaimana mengelola orang-orang tersebut mungkin dibandingkan dengan seorang profesor pertanian yang mengajari para muridnya: "Iklim adalah patokan pertama bagi petani. Sumber-sumber daya*nya* menentukan prosedurnya. Ia pertama-tama harus mempertimbangkan lokalitasnya. Jika tanahnya adalah lempung, ia harus melakukan ini dan ini. Jika tanahnya pasir, ia harus bertindak dalam cara yang lain. Setiap ketrampilan terbuka bagi petani yang ingin membersihkan dan memperbaiki tanahnya. Jika ia cukup terampil, pupuk *yang ada padanya* akan menimbulkan padanya suatu rencana operasi. Seorang profesor hanya dapat secara samar-samar melacak rencana ini sebelumnya karena hal ini niscaya tunduk pada ketidakstabilan semua hipotesa; persoalan tersebut memiliki banyak bentuk, komplikasi, dan keadaan yang sulit untuk diramalkan dan dipecahkan secara mendetail."

Oh, para penulis yang luhur! Mohon ingat sesekali bahwa lempung, pasir, dan pupuk yang secara sewenang-wenang

Anda abaikan ini adalah manusia! Mereka sama dengan Anda! Mereka adalah mahluk yang cerdas dan bebas seperti Anda sendiri! Seperti Anda, mereka juga telah menerima dari Tuhan kemampuan untuk mengamati, merencanakan, berpikir, dan menilai bagi diri mereka sendiri!

Kediktatoran Sementara

Berikut ini adalah tulisan Mably tentang masalah hukum dan pembuat hukum. Dalam bagian-bagian sebelum bagian yang dikutip di sini, Mably mengandaikan hukum, karena mengabaikan keamanan, telah usang. Ia kemudian berkata kepada pembaca berikut ini:

> Dalam keadaan ini, jelas bahwa pegas pemerintah kendur. *Beri ia* ketegangan baru, dan kejahatan tersebut akan teratasi . . . Jangan terlalu berpikir menghukum kesalahan, dan lebih banyaklah berpikir mengganjar *sesuatu yang Anda butuhkan*. Dengan cara ini Anda akan memulihkan semangat muda *republik Anda*. Karena orang-orang biasa tidak tahu tentang prosedur ini, mereka telah kehilangan kebebasan mereka! Namun jika kejahatan itu telah begitu maju hingga prosedur-prosedur pemerintah biasa tidak mampu mengatasinya, maka *gunakan* sidang luar biasa dengan kekuatan besar untuk jangka pendek. Imajinasi warga negara perlu diberi hantaman keras.

Dengan cara ini Mably terus menulis hingga 20 jilid.

Dalam pengaruh ajaran seperti ini—yang berasal dari pendidikan klasik—ada suatu masa ketika setiap orang ingin menempatkan diri mereka di atas umat manusia demi untuk menata, mengorganisasi, dan mengaturnya dengan caranya sendiri.

Kaum Sosialis Menginginkan Kesetaraan Kekayaan

Berikutnya mari kita mengkaji Condillac menyangkut persoalan para pembuat hukum dan umat manusia ini:

> Tuanku, andaikan sosok Lycurgus atau Solon. Dan sebelum Anda selesai membaca esai ini, hibur diri Anda dengan memberikan hukum kepada orang-orang liar di Amerika atau Afrika. Batasi para pengembara ini untuk memperbaiki tempat tinggal; ajari mereka memelihara perkumpulan . . . Usahakan mereka membangun kesadaran sosial yang telah ditanamkan alam pada diri mereka . . . Paksa mereka untuk mulai menjalankan kewajiban-kewajiban kemanusiaan . . . Gunakan hukuman untuk membuat kesenangan-kesenangan inderawi tak mereka sukai. Maka Anda akan melihat bahwa setiap poin legislasi Anda akan membuat orang-orang liar ini membuang kejahatan dan merangkul kebajikan.
>
> Semua bangsa memiliki hukum. Namun sedikit bangsa yang bahagia. Mengapa demikian? Karena para pembuat hukum itu sendiri hampir selalu abai terhadap tujuan masyarakat, yakni penyatuan berbagai keluarga berdasarkan kepentingan bersama.
>
> Ketidakberpihakan dalam hukum mengandung dua hal: pembentukan kesetaraan dalam kekayaan dan kesetaraan dalam martabat di antara warga negara . . . Ketika hukum membentuk kesetaraan yang lebih besar, ia menjadi lebih berbahaya bagi setiap warga negara . . . Ketika semua manusia setara dalam kekayaan dan martabat—dan ketika hukum tidak menyisakan celah harapan untuk mengganggu kesetaraan ini—maka bagaimana bisa manusia terangsang oleh ketamakan, ambisi, pemborosan, kemalasan, kelambanan, kecemburuan, kebencian, atau keirian?
>
> Apa yang telah Anda pelajari tentang republik Sparta

hendaknya mencerahkan Anda menyangkut persoalan ini. Tidak ada negara lain yang pernah memiliki hukum yang lebih serasi dengan tatanan alam dan kesetaraan.

Kesalahan Para Penulis Sosialis

Sebenarnya *tidak* aneh bahwa selama abad ke-17 dan 18 ras manusia dilihat sebagai bahan pasif, yang bisa menerima apa saja—bentuk, wajah, energi, gerakan, kehidupan—dari seorang pangeran agung atau pembuat hukum agung atau seorang jenius agung. Abad-abad ini sangat matang mempelajari zaman antik. Dan zaman antik hadir di mana pun—di Mesir, Persia, Yunani, Roma—saat terlihat pertunjukan tentang sedikit manusia membentuk umat manusia menurut kehendak mereka sendiri, dengan paksaan dan penipuan. Namun hal ini tidak membuktikan bahwa keadaan ini diinginkan. Hal ini hanya memperlihatkan bahwa karena manusia dan masyarakat mampu melakukan perbaikan, maka bisa diperkirakan bahwa kesalahan, kebodohan, despotisme, perbudakan, dan takhayul paling besar menjelang awal sejarah. Para penulis yang dikutip di atas tidak melakukan kesalahan ketika mereka menemukan bahwa lembaga-lembaga purba seperti itu, namun mereka melakukan kesalahan ketika mereka menjadikan itu semua obyek kekaguman dan peniruan bagi generasi masa depan. Karena tidak kritis dan memiliki kecenderungan konformis yang kekanak-kanakan, mereka menerima begitu saja kebesaran, martabat, moralitas, dan kebahagiaan masyarakat-masyarakat dunia lama tersebut. Mereka tidak paham bahwa pengetahuan muncul dan berkembang bersama berjalannya waktu; dan bahwa sesuai dengan pertumbuhan pengetahuan ini, *kekuatan* berjalan beriringan dengan *kebenaran*, dan masyarakat mendapatkan kembali dirinya sendiri.

Apa itu Kebebasan?

Sebenarnya apa itu perjuangan politik yang kita saksikan tersebut? Apakah itu adalah perjuangan instingtif semua orang ke arah kebebasan. Dan apa itu kebebasan, yang namanya membuat jantung berdegup lebih kencang dan mengguncang dunia? Apakah ia bukan persatuan semua kebebasan—kebebasan hati nurani, pendidikan, asosiasi, pers, perjalanan, kerja, perdagangan? Pendeknya, tidakkah kebebasan adalah kemerdekaan setiap orang untuk memanfaatkan secara penuh kemampuan-kemampuannya, sejauh ia tidak mengganggu orang lain saat melakukan hal tersebut? Tidakkah kebebasan adalah penghancuran semua despotisme—tentu saja termasuk despotisme hukum? Terakhir, tidakkah kebebasan adalah pembatasan hukum hanya pada wilayah rasionalnya, yakni mengorganisasi hak individu untuk membela diri secara sah dan menghukum ketidakadilan?

Harus diakui bahwa kecenderungan ras manusia ke arah kebebasan sebagian besar terintangi, khususnya di Prancis. Hal ini umumnya disebabkan oleh suatu hasrat fatal—yang dipelajari dari ajaran-ajaran zaman antik—yang ada pada semua penulis tentang persoalan publik kita: Mereka ingin menempatkan diri mereka di atas umat manusia demi untuk merancang, mengorganisasi, dan mengaturnya menurut khayalan mereka.

Tirani Filantropis

Sementara masyarakat berjuang ke arah kebebasan, orang-orang terkenal yang menempatkan diri mereka di kepalanya ini dipenuhi dengan semangat abad ke-17 dan ke-18. Mereka hanya berpikir tentang menundukkan manusia pada tirani filantropis dari penemuan-penemuan sosial mereka sendiri. Seperti Rousseau, mereka berhasrat untuk memaksa umat

manusia dengan patuh menanggung belenggu kesejahteraan publik yang telah mereka impikan dalam imajinasi mereka sendiri.

Hal ini terutama benar pada 1789. Segera setelah rezim lama tersebut dihancurkan masyarakat tunduk pada tatanan-tatanan artifisial yang lain, yang selalu bermula dari titik yang sama: kemahakuasaan hukum.

Dengarkan gagasan-gagasan beberapa penulis dan politisi selama masa itu:

> SAINT-JUST: Si pembuat hukum memerintah masa depan. Ia-lah yang *menginginkan* kebaikan umat manusia. Ia membentuk manusia sebagaimana yang *ia inginkan*.

> ROBESPIERRE: Fungsi pemerintah adalah mengarahkan kekuatan fisik dan moral bangsa ke arah tujuan yang menjadi alasan keberadaan bangsa tersebut.

> BILLAUD-VARENNES: Sebuah bangsa yang akan kembali ke kebebasan harus dibentuk secara baru. Suatu kekuatan yang kuat dan tindakan yang hebat diperlukan untuk menghancurkan prasangka-prasangka lama, mengubah adat-kebiasaan lama, memperbaiki perasaan-perasaan buruk, membatasi keinginan-keinginan yang berlebihan, dan menghancurkan kejahatan yang telah berurat-akar . . . Warga negara: ketegasan keras Lycurgus menciptakan fondasi kuat dari republik Sparta. Watak yang lemah dan mudah percaya dari Solon membenamkan bangsa Athena ke dalam perbudakan. Kesejajaran ini melingkupi keseluruhan ilmu pemerintahan tersebut.

> LE PELLETIER: Dengan mempertimbangkan tingkat

kemerosotan manusia, saya yakin perlu dilakukan suatu regenerasi total dan, jika boleh saya katakan, pembentukan sebuah bangsa baru.

Kaum Sosialis Menginginkan Kediktatoran

Sekali lagi, dikemukakan bahwa orang-orang bukan apa-apa kecuali bahan mentah. Mereka tidak berhak *menginginkan perbaikan mereka sendiri;* mereka tidak mampu melakukannya. Menurut Saint-Just, hanya si pembuat hukum yang mampu melakukannya. Orang-orang hanya menjadi apa yang *dikehendaki* si pembuat hukum itu bagi mereka. Menurut Robespierre, yang secara harfiah menyalin Rousseau, si pembuat hukum mulai dengan menetapkan *tujuan yang menjadi alasan keberadaan bangsa tersebut.* Begitu hal ini ditentukan, pemerintah hanya perlu mengarahkan *kekuatan fisik dan moral bangsa tersebut* ke tujuan itu. Di sisi lain, para penghuni bangsa tersebut tetap sepenuhnya pasif. Dan menurut ajaran-ajaran Billaud-Varennes, bangsa tersebut hendaknya tidak memiliki prasangka, perasaan, dan hasrat kecuali yang diperbolehkan oleh si pembuat hukum. Ia bahkan bergerak lebih jauh dengan mengatakan bahwa ketegasan keras dari satu orang adalah fondasi sebuah republik.

Dalam kasus di mana kejahatan begitu besar hingga prosedur pemerintahan yang biasa tidak dapat mengatasinya, Mably merekomendasikan sebuah kediktatoran untuk mengusung kebajikan: “Kembali,” katanya, “ke suatu sidang luar biasa dengan kekuasaan yang sangat besar untuk jangka waktu yang pendek. Imajinasi warga negara perlu dihantam pukulan keras.” Doktrin ini tidak dilupakan. Dengarkan Robespierre:

> Prinsip pemerintahan republikan adalah kebajikan, dan sarana yang diperlukan untuk meneguhkan kebajikan tersebut

adalah teror. Di negeri kita kita ingin mengganti keegoisan dengan moralitas, kehormatan dengan kejujuran, adat dengan prinsip, kebiasaan dengan kewajiban, tirani mode dengan kekaisaran akal-budi, celaan terhadap kemiskinan dengan celaan terhadap kejahatan, keangkuhan dengan kebanggaan, kesombongan dengan kebesaran jiwa, cinta uang dengan cinta keagungan, teman baik dengan orang-orang baik, intrik dengan manfaat, kejenakaan dengan kejeniusan, kemegahan dengan kebenaran, kejemuan kenikmatan dengan pesona kebahagiaan, kekerdilan si besar dengan kebesaran manusia, orang-orang baik, sembrono, dan merosot dengan orang-orang yang dermawan, kuat, dan bahagia; pendeknya, kita ingin mengganti semua keburukan dan absurditas sebuah kerajaan dengan semua kebajikan dan keajaiban sebuah republik.

Kesombongan Diktatorial

Betapa tinggi di atas manusia yang lain Robespierre menempatkan dirinya di sini! Dan lihat betapa sombongnya ia berbicara. Ia tidak puas berharap akan suatu kebangkitan besar semangat manusia. Ia juga tidak mengharapkan hal itu dari pemerintahan yang tertib. Tidak, ia sendiri ingin membentuk umat manusia, dan dengan sarana teror.

Berbagai pernyataan yang busuk dan kontradiktif ini diambil dari sebuah wacana oleh Robespierre di mana ia bertujuan menjelaskan *prinsip moralitas yang seharusnya memandu sebuah pemerintahan yang revolusioner.* Catat bahwa tuntutan Robespierre akan kediktatoran tidak dibuat semata-mata demi tujuan memukul mundur suatu invasi asing atau menghancurkan kelompok-kelompok yang menentang. Sebaliknya, ia menginginkan kediktatoran agar ia bisa menggunakan teror untuk mencekokkan prinsip-prin-

sip moralitasnya pada negerinya sendiri. Ia berkata bahwa tindakan ini hanya merupakan langkah sementara sebelum terbentuknya konstitusi baru. Namun dalam kenyataan, ia ingin menggunakan teror untuk menghapus dari Prancis *keegoisan, kehormatan, adat, kebiasaan, mode, keangkuhan, cinta uang, pertemanan yang baik, intrik, kejenakaan, kenikmatan, dan kemiskinan.* Tidak sampai ia, Robespierre, menyelesaikan *mukjizat-mukjizat* ini, demikian ia menyebutnya, ia akan membiarkan hukum tersebut berkuasa kembali.[7]

Pendekatan Tak Langsung terhadap Despotisme

Namun biasanya orang-orang terhormat ini—para pembaharu, pembuat hukum, dan penulis tentang persoalan publik—tidak ingin menjalankan despotisme langsung pada umat manusia. Oh tidak, mereka terlalu moderat dan filantropis untuk tindakan langsung seperti itu. Sebaliknya, mereka beralih ke hukum untuk despotisme, absolutisme, dan kemahakuasaan ini. Mereka hanya ingin membuat hukum.

Untuk memperlihatkan lazimnya gagasan aneh ini di Prancis, saya perlu menyalin bukan hanya seluruh karya Mably, Raynal, Rousseau, dan Fenelon—ditambah kutipan-kutipan panjang dari Bossuet dan Montesquieu—melainkan juga keseluruhan Konvensi tersebut. Saya tidak akan melakukan hal tersebut; saya hanya menunjukkannya pada pembaca.

---

7 Pada titik ini dalam teks asli Prancis, Bastiat berhenti dan berbicara berikut ini kepada mereka yang sangat ingin membantu dan ingin menjadi penguasa umat manusia: "Ah, kau mahluk-mahluk menyedihkan! Kau yang berpikir bahwa kau begitu hebat! Kau yang menilai kemanusiaan begitu kecil! Kau yang ingin memperbarui semua hal! Mengapa tidak kau perbarui dirimu sendiri? Tugas itu cukup memadai."

Napoleon Menginginkan Manusia Pasif

Tentu saja sama sekali tidak mengejutkan bahwa gagasan yang sama ini sangat menarik bagi Napoleon. Ia meyakininya dengan kuat dan menggunakannya dengan bersemangat. Seperti seorang ahli kimia, Napoleon menganggap seluruh Eropa sebagai bahan bagi eksperimen-eksperimennya. Namun, pada akhirnya, bahan ini berbalik melawannya.

Di St. Helena, Napoleon—dengan sangat kecewa—tampaknya mengakui adanya inisiatif pada umat manusia. Melihat hal ini, ia menjadi kurang memusuhi kebebasan. Namun, hal ini tidak mencegahnya untuk memberikan pelajaran ini kepada anaknya: "Memerintah berarti meningkatkan dan menyebarluaskan moralitas, pendidikan, dan kebahagiaan."

Setelah semua ini, hampir tidak perlu mengutip opini-opini yang sama dari Morelly, Babeuf, Owen, Saint-Simon, dan Fourier. Namun, berikut ini beberapa kutipan dari buku Louis Blanc tentang organisasi kerja: "Dalam rencana kita, masyarakat menerima momentumnya dari kekuasaan."

Kini pertimbangkan hal ini: dorongan di belakang momentum ini diberikan oleh *rencana* Louis Blanc; rencananya akan diterapkan pada masyarakat; Masyarakat yang dirujuk tersebut adalah ras manusia. Demikianlah ras manusia akan menerima momentumnya dari Louis Blanc.

Kini akan dikatakan bahwa orang-orang bebas menerima atau menolak rencana ini. Memang, orang-orang bebas menerima atau menolak *saran* dari siapa pun sekehendak mereka. Namun ini bukan cara di mana Tuan Louis Blanc memahami masalah tersebut. Ia mengharapkan bahwa rencananya akan dilegalisasi, dan karena itu diberlakukan dengan tegas pada orang-orang dengan kekuatan hukum:

> Dalam rencana kami, negara hanya perlu memberlakukan undang-undang kerja (tak ada yang lain?) yang dengannya kemajuan industri bisa dan harus bergerak *dalam kebebasan penuh.* Negara hanya menempatkan masyarakat pada suatu lerengan (hanya itu?). Lalu masyarakat akan meluncuri lerengan ini hanya dengan kekuatan hal-ihwal, dan dengan cara kerja alamiah dari *mekanisme yang mapan tersebut.*

Namun apa lerengan yang disarankan oleh Tuan Louis Blanc ini? Apakah ini tidak mengarah ke jurang? (Tidak, ia mengarah ke kebahagiaan). Jika ini benar, lalu mengapa masyarakat tidak bergerak ke sana karena pilihannya sendiri? (Karena masyarakat tidak tahu apa yang ia sendiri inginkan; ia harus didorong). Apa yang akan mendorongnya? (Kekuasaan). Dan siapa yang akan memberikan dorongan untuk kekuasaan ini? (Ya, si penemu mesin tersebutlah—dalam hal ini, Tuan Louis Blanc).

Lingkaran Jahat Sosialisme

Kita tidak akan pernah lepas dari lingkaran ini: gagasan tentang kemanusiaan yang pasif, dan kekuasaan hukum yang digunakan oleh seorang manusia besar untuk mendorong manusia-manusia lain.

Begitu berada pada lerengan ini, akankah masyarakat menikmati suatu kebebasan? (Jelas.) Dan apa itu kebebasan, Tuan Louis Blanc?

> Sangat jelas, kebebasan bukan hanya suatu hak yang diberikan; ia juga kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan-kemampuannya di bawah kendali keadilan dan dalam perlindungan hukum.

Dan ini bukan distingsi yang tak bermakna; maknanya dalam dan konsekuensinya sulit diperkirakan. Karena begitu disetujui bahwa untuk menjadi benar-benar bebas seseorang harus memiliki kekuasaan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan-kemampuannya, maka hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki suatu tuntutan pada masyarakat akan suatu pendidikan yang akan *memungkinkannya* mengembangkan dirinya sendiri. Hal ini juga berarti bahwa setiap orang memiliki suatu tuntutan pada masyarakat akan sarana-sarana produksi, yang tanpanya aktivitas manusia tidak bisa sepenuhnya efektif. Kini dengan tindakan apa masyarakat bisa memberikan kepada setiap orang pendidikan dan sarana produksi yang diperlukan tersebut, jika bukan dengan tindakan negara?

Dengan demikian, sekali lagi, kebebasan adalah kekuasaan. Kekuasaan ini terdiri dari apa? (Terdidik dan diberi sarana produksi). Siapa yang akan memberikan pendidikan dan sarana produksi tersebut? (Masyarakat, *yang meminjamkannya kepada setiap orang*). Dengan tindakan apa masyarakat memberikan sarana produksi kepada mereka yang tidak memilikinya? (Ya, *dengan tindakan negara*). Dan dari siapa negara akan mengambil sarana-sarana produksi tersebut?

Biarlah pembaca menjawab pertanyaan tersebut. Biarlah pembaca juga melihat arah ke mana pertanyaan ini akan membawa kita.

Doktrin Kaum Demokrat

Fenomena aneh masa kita—suatu fenomena yang mungkin akan mengherankan anak-cucu kita—adalah suatu doktrin yang didasarkan pada tiga hipotesa berikut ini: kepasifan

total manusia, kemahakuasaan hukum, dan pembuat hukum yang tak-dapat-salah. Ketiga gagasan ini membentuk simbol sakral dari mereka yang menyatakan diri mereka sepenuhnya demokratis.

Para pendukung doktrin ini juga mengaku memiliki sifat *sosial*. Sejauh mereka demokratis, mereka menempatkan keyakinan yang tak terbatas pada manusia. Namun sejauh mereka sosial, mereka menganggap manusia sedikit lebih baik dibanding lempung. Mari kita mengkaji kontras ini secara lebih mendetail.

Apa sikap si demokrat tersebut saat hak-hak politik di-diskusikan? Bagaimana ia melihat orang-orang saat seorang pembuat hukum akan dipilih? Ah, ia mengklaim bahwa orang-orang tersebut memiliki suatu kebijaksanaan instingtif; mereka diberkahi dengan persepsi terbaik; *kehendak mereka selalu benar*; kehendak umum tersebut *tidak dapat salah*; pemungutan suara tidak bisa terlalu universal.

Ketika tiba saatnya memilih, tampaknya si pemilih tidak akan dimintai suatu jaminan akan kebijaksanaannya. Kehendak dan kemampuannya untuk memilih dengan bijak diterima begitu saja. Dapatkah orang-orang tersebut salah? Apakah kita tidak hidup di suatu zaman pencerahan? Apa! Apakah orang-orang tersebut harus selalu diberi tali-kekang? Apakah mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka melalui usaha dan pengorbanan yang besar? Apakah mereka tidak diberi bukti yang cukup tentang kecerdasan dan kebijaksanaan mereka? Apakah mereka bukan orang-orang dewasa? Apakah mereka tidak mampu menilai untuk diri mereka sendiri? Apakah mereka tidak tahu apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri? Apakah ada sebuah kelompok atau seorang manusia yang akan begitu berani sehingga menempatkan dirinya di atas orang-orang tersebut, dan menilai dan bertindak atas nama mereka?

Tidak, tidak, orang-orang tersebut *bebas* dan seharusnya *bebas*. Mereka ingin menangani urusan-urusan mereka sendiri, dan mereka seharusnya begitu.

Namun ketika si pembuat hukum tersebut akhirnya terpilih—ah! maka nada pidatonya mengalami perubahan radikal. Orang-orang tersebut dikembalikan pada kepasifan, kemandekan, dan ketidaksadaran; si pembuat hukum tersebut masuk ke dalam suatu kemahakuasaan. Kini dirinyalah yang menganjurkan, mengarahkan, mendorong, dan mengorganisasi. Umat manusia hanya perlu tunduk; masa despotisme menyeruak. Kini kita melihat gagasan fatal ini: orang-orang yang, selama pemilihan, begitu bijak, begitu bermoral, dan begitu sempurna, kini tidak memiliki kecenderungan apa pun; atau jika mereka memilikinya, maka itu adalah kecenderungan yang mengarah ke kemerosotan.

Konsep Kebebasan Sosialis

Namun apakah orang-orang tersebut tidak harus diberi sedikit kebebasan?

Namun Tuan Pemberi Pertimbangan telah meyakinkan kita bahwa *kebebasan niscaya mengarah pada monopoli!*

Kita paham bahwa kebebasan berarti persaingan. Namun menurut Tuan Louis Blanc, persaingan adalah sebuah sistem yang menghancurkan para pengusaha dan memusnahkan orang-orang. Karena alasan inilah orang-orang yang bebas dihancurkan dan dimusnahkan sesuai dengan derajat kebebasan mereka. (Mungkin Tuan Luois Blanc harus melihat hasil-hasil persaingan di, misalnya, Swiss, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.)

Tuan Louis Blanc juga memberi tahu kita bahwa *persaingan mengarah pada monopoli*. Dan dengan pemikiran yang sama, ia kemudian memberi tahu kita bahwa *harga yang*

murah mengarah pada harga yang mahal; bahwa *persaingan mendorong produksi ke aktivitas destruktif;* bahwa *persaingan mengikis sumber-sumber kekuatan untuk membeli;* bahwa *persaingan mendorong peningkatan produksi sambil, pada saat yang bersamaan, mendorong penurunan dalam konsumsi.* Hal ini berarti bahwa orang-orang yang bebas memproduksi demi untuk tidak mengkonsumsi; bahwa kebebasan berarti *penindasan dan kegilaan* di kalangan orang-orang tersebut; dan bahwa Tuan Louis Blanc jelas-jelas harus mengatasinya.

Kaum Sosialis Mencemaskan Semua Kebebasan

Jadi, kebebasan apa yang akan diizinkan oleh para pembuat hukum tersebut untuk dimiliki orang-orang? Kebebasan hati nurani? (Namun jika ini diizinkan, kita akan melihat orang-orang tersebut memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi atheis).

Lalu kebebasan pendidikan? (Namun para orangtua harus membayar para profesor untuk mengajar anak-anak mereka imoralitas dan kepalsuan; selain itu, menurut Tuan Thiers, jika kebebasan diserahkan kepada kebebasan nasional, ia akan berhenti menjadi nasional, dan kita akan mengajari anak-anak kita gagasan-gagasan bangsa Turki atau Hindu; sementara dengan despotisme legal menyangkut pendidikan, anak-anak kita kini memiliki nasib baik diajar gagasan-gagasan mulia bangsa Roma).

Lalu kebebasan kerja? (Namun itu akan berarti persaingan yang, pada gilirannya, menjadikan produksi tak terkonsumsi, menghancurkan para pengusaha, dan memusnahkan orang-orang.)

Mungkin kebebasan berdagang? (Namun setiap orang tahu—dan para pendukung tarif protektif telah membuktikan lagi dan lagi—bahwa kebebasan perdagangan menghancurkan

setiap orang yang terlibat di dalamnya, dan bahwa kita perlu menindas kebebasan berdagang untuk makmur).

Mungkin kebebasan untuk membentuk perkumpulan? (Namun, menurut doktrin sosialis, kebebasan sejati dan perkumpulan sukarela bertentangan satu sama lain, dan tujuan kaum sosialis tersebut adalah menindas kebebasan untuk berkumpul justru demi mendorong orang-orang untuk berkumpul bersama dalam kebebasan sejati).

Dengan demikian jelas, kata hati kaum sosial demokrat tidak bisa mengizinkan orang-orang untuk memiliki suatu kebebasan karena mereka percaya bahwa sifat manusia cenderung selalu mengarah pada semua jenis kemerosotan dan malapetaka. Dengan demikian, para pembuat hukum harus membuat berbagai rencana bagi orang-orang tersebut demi menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri.

Garis pemikiran ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang menantang: Jika orang-orang itu sedemikian tidak mampu, tidak bermoral, dan sedemikian bodoh sebagaimana yang diindikasikan oleh para politisi tersebut, lalu mengapa hak orang-orang yang sama ini untuk memilih dibela dengan begitu kuat?

Gagasan Manusia Super

Klaim-klaim para pengorganisasi manusia ini memunculkan pertanyaan baru yang telah sering saya tanyakan kepada mereka dan yang, sejauh yang saya tahu, tidak pernah mereka jawab: Jika kecenderungan-kecenderungan alamiah manusia begitu buruk sehingga tidak aman jika mengizinkan mereka untuk bebas, mengapa kecenderungan-kecenderungan para pengorganisasi ini selalu bagus? Tidakkah para pembuat hukum dan agen-agen terpilih mereka juga termasuk ras manusia? Atau apakah mereka percaya bahwa mereka sendiri

terbuat dari lempung yang lebih baik dibanding manusia-manusia yang lain? Para pengorganisasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat, ketika tidak diarahkan, akan bergerak ke arah penghancurannya karena insting-insting manusia begitu jahat. Para pembuat hukum mengklaim menghentikan rute bunuh diri ini dan memberinya arah yang lebih bijaksana. Dengan demikian, tampaknya para pembuat hukum dan pengorganisasi tersebut telah menerima dari Tuhan suatu kecerdasan dan kebijaksanaan yang menempatkan mereka di atas umat manusia.

Mereka akan menjadi para penggembala yang menggembala kita, domba mereka. Jelas bahwa tatanan seperti itu mengandaikan bahwa mereka secara alamiah lebih unggul dibanding kita semua. Dan jelas bahwa kita sepenuhnya dibenarkan jika menuntut dari para pembuat hukum dan pengorganisasi tersebut bukti dari keunggulan alamiah ini.

Kaum Sosialis Menolak Pilihan Bebas

Mohon dipahami bahwa saya tidak mempermasalahkan hak mereka untuk menemukan perpaduan-perpaduan sosial, untuk mengiklankan diri mereka, untuk mendorong diri mereka sendiri, dan untuk mencoba-coba pada diri mereka sendiri, dengan biaya dan risiko mereka sendiri. Namun saya sungguh-sungguh mempermasalahkan hak mereka untuk memberlakukan rencana-rencana ini pada kita melalui hukum—melalui paksaan—dan memaksa kita membayar pada mereka dengan pajak kita.

Saya tidak menuntut bahwa para pendukung berbagai aliran pemikiran sosial ini—kaum Proudhonis, kaum Cabetis, kaum Fourieris, kaum Universitaris, dan kaum Proteksionis—meninggalkan berbagai gagasan mereka. Saya hanya menuntut bahwa mereka membuang satu gagasan yang sama-sama

mereka yakini berikut ini: Mereka hanya perlu membuang gagasan tentang *memaksa* kita untuk menyetujui kelompok dan rencana-rencana mereka, proyek-proyek sosial mereka, bank-bank bebas-kredit mereka, konsep moralitas Greko-Romawi mereka, dan regulasi-regulasi perdagangan mereka. Saya hanya meminta bahwa kita diizinkan untuk memutuskan rencana-rencana bagi diri kita sendiri; bahwa kita tidak dipaksa untuk menerima rencana-rencana tersebut, secara langsung atau tak langsung, jika kita menganggap rencana itu bertentangan dengan kepentingan terbaik kita atau hati nurani kita.

Namun para pengorganisasi ini menginginkan akses ke dana pajak dan ke kekuasaan hukum demi untuk menjalankan rencana-rencana mereka. Selain menindas dan tidak adil, keinginan ini juga memperlihatkan pengandaian fatal bahwa si pengorganisasi tidak-bisa-salah dan umat manusia tidak mampu. Namun, sekali lagi, jika orang-orang tidak mampu untuk melakukan penilaian bagi diri mereka sendiri, maka apa gunanya semua pembicaraan tentang hak pilih universal ini?

Sebab Revolusi-revolusi Prancis

Kontradiksi dalam gagasan-gagasan ini, yang sangat disayangkan namun logis, tercermin dalam peristiwa-peristiwa di Prancis. Sebagai contoh, orang-orang Prancis telah memimpin orang-orang Eropa yang lain dalam mendapatkan hak-hak mereka—atau, lebih akuratnya, tuntutan-tuntutan politik mereka. Namun kenyataan ini sama sekali tidak mencegah kita untuk menjadi bangsa yang paling dikendalikan, paling diatur, paling dibebani, paling dikekang, dan paling dieksploitasi di Eropa. Prancis juga memimpin semua bangsa yang lain sebagai sebuah bangsa di mana revolusi-revolusi terus-menerus harus diantisipasi. Dan dalam keadaan tersebut, sangat alamiah bahwa memang begitulah yang terjadi.

Dan hal ini akan terus terjadi sejauh para politisi kita terus menerima gagasan yang diungkapkan dengan sangat baik oleh Tuan Louis Blanc ini: “Masyarakat mendapatkan momentumnya dari kekuasaan.” Hal ini akan tetap terjadi sejauh manusia yang berperasaan tetap terus pasif; sejauh mereka menganggap diri mereka tidak mampu memperbaiki kemakmuran dan kebahagiaan mereka sendiri dengan kecerdasan dan energi mereka sendiri; sejauh mereka mengharapkan segala sesuatu dari hukum; pendeknya, sejauh mereka membayangkan bahwa hubungan mereka dengan negara sama dengan hubungan antara gembala dengan penggembalanya.

Kekuasaan Besar Pemerintah

Selama gagasan-gagasan ini berkuasa, sangat jelas bahwa tanggung jawab pemerintah sangat besar. Nasib baik dan nasib buruk, kekayaan dan kemelaratan, kesetaraan dan ketaksetaraan, kebajikan dan kekejian—semua ini dengan demikian bergantung pada administrasi politik. Ia dibebani dengan segala hal, ia menangani semua hal, ia melakukan semua hal; dan karena itu ia bertanggung jawab atas segala hal.

Jika kita beruntung, maka pemerintah berhak mendapatkan ucapan terimakasih kita; namun jika kita tidak beruntung, maka pemerintah yang dipersalahkan. Karena tidakkah kedirian dan hak milik kita kini ada dalam kekuasaan negara? Bukankah hukum mahakuasa?

Dalam menciptakan monopoli pendidikan, pemerintah harus menjawab harapan-harapan para ayah berbagai keluarga yang dengan demikian telah dicabut kebebasannya; dan jika harapan ini diserakkan, lalu salah siapa semua ini?

Dalam mengatur industri, pemerintah telah berjanji untuk menjadikannya berhasil; jika tidak, maka mencabut kebebasan industri adalah sesuatu yang absurd. Dan jika kini industri

morat-marit, salah siapa semua ini?

Dalam mencampuri keseimbangan perdagangan dengan memainkan bea-cukai, pemerintah dengan demikian berjanji untuk menjadikan perdagangan lebih baik; dan jika hal ini menyebabkan penghancuran dan bukan kemakmuran, salah siapa semua ini?

Dalam memberi industri-industri maritim proteksi yang ditukar dengan kebebasan mereka, pemerintah berusaha untuk menjadikan mereka menguntungkan; dan jika mereka menjadi beban bagi para pembayar pajak, salah siapa semua ini?

Karena itu tidak ada keluhan pada suatu bangsa di mana pemerintah tidak menjadikan dirinya sendiri bertanggung jawab secara sukarela. Maka, apakah mengejutkan jika setiap kegagalan meningkatkan ancaman akan revolusi yang lain di Prancis?

Dan obat apa yang ditawarkan untuk hal ini? Memperluas secara tak terbatas wilayah hukum; yakni, tanggung jawab pemerintah.

Namun jika pemerintah berusaha mengontrol dan menaikkan upah, dan tidak dapat melakukannya; jika pemerintah berusaha melindungi semua orang yang mungkin hidup berkekurangan, dan tidak dapat melakukannya; jika pemerintah berusaha membantu semua pekerja menganggur, dan tidak dapat melakukannya; jika pemerintah berusaha untuk meminjamkan uang bebas-bunga kepada semua peminjam, dan tidak dapat melakukannya; jika, dalam kata-kata yang menyesal kita ucapkan yang berasal dari pena Tuan de Lamartine, "Negara beranggapan bahwa tujuannya adalah untuk mencerahkan, mengembangkan, memperluas, memperkuat, menspiritualkan, dan menyucikan jiwa orang-orang"—dan jika pemerintah tidak dapat melakukan semua ini, lalu bagaimana? Apakah tidak jelas bahwa setelah setiap

kegagalan pemerintah—yang amat sangat mungkin terjadi—akan ada suatu revolusi yang tak-terelakkan?

Politik dan Ekonomi

[Kini mari kita kembali ke persoalan yang telah secara singkat dibahas di bagian pembuka tulisan ini: hubungan ekonomi dan politik—ekonomi politik.[8]]

Sebuah ilmu ekonomi harus dikembangkan sebelum ilmu politik bisa dirumuskan dengan logis. Pada dasarnya, ekonomi adalah ilmu untuk menentukan apakah kepentingan-kepentingan manusia itu harmonis atau bertentangan. Hal ini harus diketahui sebelum suatu ilmu politik dapat dirumuskan untuk menentukan fungsi-fungsi pemerintah yang tepat.

Segera setelah perkembangan suatu ilmu ekonomi, dan pada awal perumusan sebuah ilmu politik, pertanyaan yang sangat penting ini harus dijawab: Apa itu hukum? Apa ia seharusnya? Apa lingkupnya, apa batas-batasnya? Secara logis, pada titik apa kekuasaan yang adil dari para pembuat hukum berhenti?

Saya tidak ragu menjawab: *Hukum adalah kekuatan bersama yang diorganisasi untuk bertindak sebagai suatu rintangan bagi ketidakadilan.* Pendeknya, *hukum adalah keadilan*.

Fungsi-fungsi Legislatif yang Tepat

Tidak benar bahwa si pembuat hukum memiliki kekuasaan absolut atas kedirian dan kepemilikan kita. Keberadaan kedirian dan kepemilikan mendahului keberadaan si pembuat hukum, dan fungsinya hanyalah untuk menjamin keamanan mereka.

Tidak benar bahwa fungsi hukum adalah mengatur hati

---

8 Catatan penerjemah FEE: Bastiat menulis tiga buku lain dan beberapa artikel untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang terkandung dalam tiga kalimat paragraf berikutnya.

nurani kita, gagasan kita, kehendak kita, pendidikan kita, opini kita, kerja kita, perdagangan kita, bakat kita, atau kesenangan-kesenangan kita. Fungsi hukum adalah melindungi pemakaian bebas atas hak-hak ini, dan mencegah siapa pun mencampurtangani pemakaian bebas hak-hak yang sama ini oleh orang lain.

Karena hukum niscaya membutuhkan dukungan kekuatan, wilayahnya yang sah hanyalah di wilayah-wilayah di mana penggunaan kekuatan tersebut dibutuhkan. Inilah keadilan.

Setiap individu memiliki hak untuk menggunakan kekuatan tersebut untuk pembelaan-diri yang sesuai hukum. Karena alasan inilah kekuatan kolektif tersebut—yang hanyalah kombinasi yang terorganisasi dari kekuatan-kekuatan individu—mungkin digunakan secara sah untuk tujuan yang sama; dan ia tidak boleh digunakan secara sah untuk tujuan lain.

Hukum semata-mata merupakan organisasi hak pembelaan-diri individu yang ada sebelum hukum itu dirumuskan. Hukum adalah keadilan.

Hukum dan Derma Tidak Sama

Misi hukum *bukanlah* untuk menindas orang-orang dan merampas kepemilikan mereka, meskipun hukum tersebut mungkin bertindak dalam semangat filantropis. Misinya adalah melindungi orang-orang dan hak milik.

Lebih jauh, tidak bisa dikatakan bahwa hukum mungkin bersifat filantropis jika, dalam prosesnya, ia berhenti menindas orang dan merampas kepemilikan mereka; ini akan merupakan suatu kontradiksi. Hukum tidak dapat tidak berdampak pada kedirian dan kepemilikan; dan jika hukum melakukan sesuatu selain melindungi keduanya, maka tindakannya dengan demikian niscaya melanggar kebebasan orang-orang dan hak mereka untuk memiliki hak-milik.

Hukum adalah keadilan—sederhana dan jelas, ketat dan terbatas. Setiap mata bisa melihatnya, dan setiap pikiran dapat memahaminya; karena keadilan dapat diukur, tetap, dan tidak berubah. Keadilan tidak lebih dari ini atau kurang dari ini.

Jika Anda melampaui batas yang tepat ini—jika Anda berusaha untuk membuat hukum tersebut religius, persaudaraan (*fraternal*), menyetarakan, filantropis, industrial, literer, atau artistik—Anda dengan demikian akan tersesat dalam suatu wilayah tak berpeta, dalam kekaburan dan ketidakpastian, dalam suatu utopia yang dipaksakan atau, yang lebih buruk, dalam berbagai macam utopia, yang masing-masing berusaha untuk merebut hukum tersebut dan memberlakukannya pada Anda. Hal ini benar karena persaudaraan dan filantropi, tidak seperti keadilan, tidak memiliki batas-batas yang pasti. Begitu dimulai, di mana Anda akan berhenti? Dan di mana hukum itu akan menghentikan dirinya?

Jalan Menanjak ke Komunisme

Tuan de Saint-Cricq akan memperluas filantropinya hanya ke beberapa kelompok industri; ia menuntut bahwa hukum *mengontrol konsumen untuk menguntungkan produsen.*

Tuan Considerant akan mendukung perjuangan kelompok-kelompok pekerja; ia akan menggunakan hukum untuk memastikan bagi mereka *jaminan minimal pakaian, perumahan, makanan, dan semua kebutuhan hidup yang lain.*

Tuan Louis Blanc akan mengatakan—dan dengan alasan—bahwa jaminan-jaminan minimal ini hanyalah awal dari persaudaraan menyeluruh; ia akan berkata bahwa hukum harus memberi sarana produksi dan pendidikan gratis bagi semua pekerja.

Orang lain akan melihat bahwa rencana ini masih akan menyisakan ruang bagi ketidaksetaraan; ia akan menyatakan

bahwa hukum harus memberi setiap orang—bahkan di dusun kecil yang paling terpencil—kemewahan, kesusastraan, dan seni.

Semua tawaran ini adalah jalan menanjak ke komunisme; legislasi dengan demikian akan menjadi—dalam kenyataan sudah—medan pertempuran bagi fantasi dan ketamakan setiap orang.

Dasar bagi Pemerintahan Stabil

Hukum adalah keadilan. Dalam proposisi ini suatu pemerintahan yang sederhana dan tahan lama dapat dibayangkan. Dan saya menantang siapa pun untuk mengatakan betapa pemikiran tentang revolusi, pemberontakan, pergolakan dapat muncul melawan suatu pemerintahan yang kekuatan terorganisasinya terbatas hanya untuk menekan ketidakadilan.

Di bawah rezim seperti itu, akan ada kemakmuran paling besar—dan ia akan didistribusikan dengan paling setara. Menyangkut berbagai penderitaan yang tak terpisahkan dari manusia, tak seorang pun akan berpikir tentang menyalahkan pemerintah. Hal ini benar karena, jika kekuatan pemerintah terbatas pada menekan ketidakadilan, maka pemerintah akan sama tak bisa dipersalahkan menyangkut berbagai penderitaan ini sebagaimana ia tak bersalah dalam kaitannya dengan perubahan suhu udara.

Sebagai bukti pernyataan ini, pertimbangkan pertanyaan ini: Apakah orang-orang pernah diketahui bangkit melawan Court of Appeal, atau mengepung Justice of the Peace, untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, kredit bebas, sarana produksi, bea-cukai yang menguntungkan, atau pekerjaan yang diciptakan-pemerintah? Setiap orang sangat tahu bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak berada dalam yurisdiksi

Court of Appeal atau Justice of the Peace tersebut. Dan jika pemerintah dibatasi pada fungsi-fungsinya yang tepat, setiap orang akan segera belajar bahwa masalah-masalah ini tidak berada dalam yurisdiksi hukum itu sendiri.

Namun membuat hukum tersebut berdasarkan prinsip persaudaraan—menyatakan bahwa semua kebaikan, dan semua keburukan, berasal dari hukum; bahwa hukum bertanggung jawab atas semua kemalangan individu dan ketidaksetaraan masyarakat—maka pintu terbuka untuk terus masuknya keluhan, kejengkelan, masalah, dan revolusi.

Keadilan Berarti Hak-hak Setara

Hukum adalah keadilan. Dan akan aneh jika hukum bisa menjadi apa pun yang lain! Tidakkah keadilan itu hak? Tidakkah hak-hak setara? Dengan hak apa hukum memaksa saya untuk menyesuaikan diri dengan rencana-rencana sosial dari Tuan Mimerel, Tuan de Melun, Tuan Thiers, atau Tuan Louis Blanc? Jika hukum memiliki hak moral untuk melakukan hal ini, mengapa ia tidak memaksa orang-orang terhormat ini untuk tunduk pada *rencana-rencana saya*? Apakah logis untuk mengandaikan bahwa alam tidak memberi saya imajinasi yang memadai untuk juga memimpikan sebuah utopia? Haruskah hukum memilih satu fantasi di antara banyak fantasi, dan memberikan kekuatan terorganisasi pemerintah tersebut hanya untuknya?

Hukum adalah keadilan. Dan jangan dikatakan—sebagaimana yang terus-menerus dikemukakan—bahwa di bawah konsep ini, hukum akan bersifat atheistik, individualistik, dan tak-berhati; bahwa ia akan menjadikan umat manusia dalam citranya sendiri. Ini adalah suatu kesimpulan yang absurd, yang bernilai hanya bagi para pemuja pemerintah yang percaya bahwa hukum *adalah* umat manusia.

Omong kosong! Apakah para pemuja pemerintah tersebut percaya bahwa orang-orang yang bebas akan berhenti bertindak? Apakah ini berarti bahwa jika kita tidak menerima energi dari hukum, kita akan tidak menerima energi sama sekali? Apakah ini berarti bahwa jika hukum dibatasi pada fungsi melindungi penggunaan bebas atas kemampuan-kemampuan kita, kita tidak akan mampu menggunakan kemampuan-kemampuan kita? Andaikan bahwa hukum tersebut tidak memaksa kita untuk mengikuti bentuk-bentuk agama tertentu, atau sistem-sistem asosiasi tertentu, atau metode pendidikan tertentu, atau regulasi pekerja tertentu, atau regulasi perdagangan tertentu, atau rencana-rencana derma tertentu; apakah hal ini berarti bahwa kita akan dengan mudah terjerumus ke dalam atheisme, kepapaan, kebodohan, penderitaan, dan ketamakan? Jika kita bebas, apakah hal ini berarti bahwa kita tidak lagi akan mengenali kekuasaan dan kebaikan Tuhan? Apakah hal ini berarti bahwa kita akan berhenti untuk bergaul dan bergabung satu sama lain, membantu satu sama lain, mencintai dan menolong saudara-saudara kita yang malang, mempelajari rahasia-rahasia alam, dan berusaha untuk memperbaiki kemampuan-kemampuan diri kita sendiri sebaik mungkin?

Jalan Menuju Kehormatan dan Kemajuan

Hukum adalah keadilan. Dan di bawah hukum keadilan tersebutlah—di bawah kekuasaan hak; di bawah pengaruh kebebasan, keamanan, stabilitas, dan tanggung jawab—setiap orang akan mencapai nilai nyatanya dan martabat sejatinya dari kemanusiaannya. Hanya di bawah hukum keadilan inilah umat manusia perlahan tapi pasti akan mencapai desain Tuhan akan kemajuan umat manusia yang tertib dan damai.

Tampak bagi saya bahwa hal ini secara teoretis benar, karena apa pun persoalan yang dibahas—apakah itu keagamaan,

filosofis, politik, atau ekonomi; apakah persoalan tersebut menyangkut kemakmuran, moralitas, kesetaraan, hak, keadilan, kemajuan, tanggung jawab, kerjasama, hak-milik, kerja, perdagangan, modal, upah, pajak, populasi, keuangan, atau pemerintahan—pada titik apa pun di horison ilmiah yang saya selidiki, saya terus-menerus sampai pada satu kesimpulan ini: Solusi bagi persoalan-persoalan hubungan manusia akan ditemukan dalam kebebasan.

Bukti Sebuah Gagasan

Dan tidakkah pengalaman membuktikan hal ini? Lihat di seluruh dunia. Negara-negara mana yang memiliki orang-orang yang paling damai, paling bermoral, dan paling bahagia? Orang-orang tersebut ditemukan di negeri-negeri di mana hukum paling sedikit mencampuri persoalan-persoalan pribadi; di mana pemerintah paling kurang dirasakan; di mana individu memiliki lingkup gerak yang paling besar, dan opini bebas memiliki pengaruh terbesar; di mana kekuasaan administratif paling kecil dan sederhana; di mana pajak paling ringan dan paling mendekati setara, dan ketidakpuasan umum paling kurang menarik dan paling kurang bisa dibenarkan; di mana individu dan kelompok paling aktif memegang tanggung jawab mereka, dan sebagai akibatnya, di mana moral umat manusia yang dianggap tidak sempurna terus-menerus diperbaiki; di mana perdagangan, perkumpulan-perkumpulan, dan asosiasi-asosiasi paling kurang dibatasi; di mana buruh, modal, dan populasi mengalami pemindahan paksa yang paling sedikit; di mana umat manusia paling kuat mengikuti kecenderungan-kecenderungan alamiahnya sendiri; di mana penemuan-penemuan manusia paling mendekati harmoni dengan hukum-hukum Tuhan; pendeknya, orang-orang yang paling bahagia, paling bermoral, dan paling damai adalah

orang-orang yang paling dekat mengikuti prinsip ini: Meskipun umat manusia tidak sempurna, semua harapan tersandar pada tindakan-tindakan bebas dan sukarela orang-orang dalam batas-batas hak tersebut; hukum atau paksaan tidak digunakan untuk apa pun kecuali penataan keadilan universal.

Hasrat Menguasai Orang Lain

Hal ini harus dikatakan: Ada terlalu banyak manusia "besar" di dunia ini—para pembuat hukum, pengorganisasi, penolong, pemimpin rakyat, bapak bangsa, dan seterusnya. Terlalu banyak orang yang menempatkan diri mereka di atas umat manusia; mereka berkarier mengorganisasinya, melindungi, dan menguasainya.

Kini seseorang akan berkata, "Kau sendiri melakukan hal ini."

Benar. Namun harus diakui bahwa saya bertindak dalam pengertian yang sepenuhnya berbeda; jika saya tergabung dalam jenjang para pembaharu, hal ini semata-mata untuk tujuan meyakinkan mereka agar membiarkan orang-orang sendiri. Saya tidak melihat orang-orang sebagaimana Vancauson melihat otomatonnya. Sebaliknya, sebagaimana sang fisiolog menerima tubuh manusia sebagaimana adanya, demikian juga saya menerima orang-orang sebagaimana adanya mereka. Saya hanya ingin belajar dan mengagumi.

Sikap saya terhadap semua orang lain dengan baik tergambarkan oleh cerita dari seorang pengelana ternama berikut ini: Ia suatu hari sampai di tengah-tengah sebuah suku orang-orang liar, di mana seorang anak baru saja dilahirkan. Sekumpulan tukang ramal, tukang sihir, dukun—yang mengenakan berbagai cincin, pengait, dan kawat—mengelilinginya. Seseorang berkata: "Anak ini tidak akan pernah mencium bau pipa-perdamaian kecuali jika saya merentangkan cuping

hidungnya." Yang lain berkata: "Ia tidak akan pernah mampu mendengar kecuali jika saya menarik cuping kupingnya hingga ke pundaknya." Yang ketiga berkata: "Ia tidak akan pernah melihat sinar matahari kecuali jika saya menelengkan matanya." Yang lain berkata: "Ia tidak akan pernah berdiri tegak kecuali jika saya membengkokkan kakinya." Yang kelima berkata: "Ia tidak akan pernah belajar berpikir kecuali jika saya meratakan jidatnya."

"Berhenti," teriak si pengelana. "Apa yang dikerjakan Tuhan itu sudah baik. Jangan mengaku tahu lebih banyak ketimbang Dia. Tuhan telah memberi anggota-anggota tubuh bagi mahluk yang rapuh ini; biarkan ia berkembang dan tumbuh kuat dengan latihan, pengalaman, dan kebebasan."

Kini Mari Kita Mencoba Kebebasan

Tuhan telah memberi kepada manusia semua yang mereka perlukan untuk merampungkan takdir mereka. Ia telah memberikan suatu bentuk sosial serta suatu bentuk manusia. Dan organ-organ sosial dari orang-orang ini begitu mapan hingga mereka akan mengembangkan diri mereka secara harmonis dalam udara bersih kebebasan. Enyahlah para dukun dan pengorganisasi! Enyahlah cincin, rantai, kait, dan penjepit mereka! Enyahlah sistem-sistem artifisial mereka! Enyahlah tingkah-polah para pengatur pemerintah, proyek-proyek sosial mereka, sentralisasi mereka, bea-cukai mereka, sekolah-sekolah pemerintah mereka, agama-agama negara mereka, kredit bebas mereka, monopoli bank mereka, regulasi mereka, restriksi mereka, penyetaraan dengan pajak mereka, moralisasi saleh mereka!

Dan kini para pembuat hukum dan "*do-gooder*" yang telah dengan sia-sia mencekokkan begitu banyak sistem pada masyarakat, semoga mereka akhirnya berakhir di mana

mereka seharusnya mulai: semoga mereka menolak semua sistem, dan mencoba kebebasan; karena kebebasan adalah suatu pengakuan keyakinan pada Tuhan dan karya-Nya.

BONUS

PETISI PEMBUAT LILIN

Frédéric Bastiat

DIAJUKAN oleh para pengusaha lilin, lentera, kandil, lampu jalan, alat pemadam lilin, alat pemadam api, dan dari para produsen gemuk, oli, damar, alkohol, dan segala sesuatu yang terkait dengan penerangan.

Para anggota terhormat Dewan Perwakilan Rakyat.
Tuan-tuan:

Anda berada di jalur yang benar. Anda menolak teori-teori yang abstrak dan kurang menghormati keberlimpahan dan harga-harga murah. Anda mencurahkan perhatian Anda terutama pada nasib produsen. Anda ingin membebaskannya dari persaingan asing, yakni menyediakan *pasar dalam negeri* bagi *industri dalam negeri.*

Kami datang untuk menawari Anda suatu kesempatan bagus bagi . . . —kita harus menyebutnya apa? Teori Anda? Tidak, tidak ada hal yang lebih menipu ketimbang teori. Doktrin Anda? Sistem Anda? Prinsip Anda? Namun Anda tidak suka doktrin, Anda ngeri terhadap sistem, dan menyangkut prinsip,

Anda menyangkal bahwa ada suatu prinsip dalam ekonomi politik; karena itu kita akan menyebutnya praktik Anda—praktik Anda tanpa teori dan tanpa prinsip.

Kami menderita karena persaingan yang membinasakan dari seorang pesaing yang tampaknya bekerja dalam keadaan yang sejauh ini lebih baik dibanding keadaan kami dalam hal produksi cahaya hingga ia *membanjiri* pasar dalam negeri dengan produksi itu, dengan harga yang sangat murah; pada saat ia muncul, penjualan kami terhenti, semua konsumen beralih kepadanya, dan sebuah cabang industri Prancis yang percabangannya tak terhitung tiba-tiba mengalami stagnasi menyeluruh. Pesaing ini, yang tak lain adalah matahari, mengobarkan perang terhadap kita dengan begitu kejam sehingga kita curiga ia dikendalikan oleh Albion yang berkhianat (sungguh diplomasi yang sangat bagus saat ini!) untuk melawan kita, terutama karena ia menaruh hormat yang tinggi terhadap pulau yang angkuh tersebut, namun tidak pada kami. [Suatu rujukan pada reputasi Britania sebagai sebuah pulau yang berkabut].

Kami memohon kebaikan hati Anda untuk mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengharuskan penutupan semua jendela, celah langit-langit, jendela loteng, daun jendela dalam dan luar, horden, tingkap, ram, lubang angin, dan gerai—pendeknya, semua jendela, lubang, celah, dan kisi-kisi yang menjadi jalan masuknya cahaya matahari ke dalam rumah, yang merugikan industri-industri yang, kami bangga mengatakannya, kami anugerahkan kepada negeri ini, sebuah negeri yang tidak mungkin membiarkan kami sekarang ini dalam sebuah persaingan yang sangat tidak setara.

Bersikap baiklah, para wakil yang terhormat, dengan memperhatikan secara serius permintaan kami, dan jangan menolaknya tanpa setidaknya mendengarkan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menopangnya.

Pertama, jika Anda menutup sebanyak mungkin akses ke cahaya alamiah, dan dengan demikian memunculkan suatu kebutuhan akan cahaya buatan, apakah industri di Prancis pada akhirnya tidak akan terdorong? Jika Prancis lebih banyak mengonsumsi gemuk, harus ada lebih banyak sapi dan biri-biri, dan akibatnya, kita akan melihat peningkatan lahan, daging, wol, kulit, dan terutama pupuk, dasar dari semua kekayaan agrikultural.

Jika Prancis mengonsumsi lebih banyak oli, kita akan melihat perluasan penanaman apiun, zaitun, dan lobak. Tanaman-tanaman yang kaya namun menanduskan tanah ini akan muncul pada waktu yang tepat dan memungkinkan kita untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kesuburan yang meningkat yang diberikan kepada tanah oleh pembiakan sapi tersebut.

Lahan-lahan kita akan tertutupi pohon-pohon damar. Kawanan lebah akan mengumpulkan wewangian dari pegunungan-pegunungan kita yang sekarang ini menyia-nyiakan mereka, seperti bebungaan yang memunculkan mereka. Dengan demikian, tidak satu pun cabang agrikultur yang tidak akan mengalami perluasan besar.

Hal yang sama juga berlaku untuk perkapalan. Ribuan kapal akan melakukan penangkapan ikan paus, dan dalam waktu dekat kita akan memiliki armada yang mampu mengusung

kehormatan Prancis dan memuaskan aspirasi-aspirasi patriotik peserta petisi, penjual lilin, dan lain-lain, yang bertandatangan tersebut.

Namun apa yang akan kita katakan tentang *kekhususan-kekhususan* pabrik Paris? Mulai sekarang Anda akan melihat sepuh, perunggu, dan kristal pada kandil, lampu, kandelar, tempat lilin, berpendar di toko-toko besar dibanding yang ada di kios-kios sekarang ini.

Tidak ada pengumpul-damar miskin di puncak bukit-bukit pasirnya, tidak ada penambang miskin di kedalaman terowongan hitamnya, yang tidak akan menerima upah yang lebih tinggi dan menikmati kemakmuran yang semakin besar.

Hanya perlu pemikiran kecil, saudara-saudara yang terhormat, untuk yakin bahwa mungkin tidak satu orang Prancis pun, mulai dari pemilik saham Anzin Company yang kaya hingga penjaja korek api yang sederhana, yang kondisinya tidak diperbaiki oleh keberhasilan petisi kita.

Kami menyadari keberatan-keberatan Anda, saudara-saudara yang terhormat; namun tidak ada satu pun dari keberatan yang tidak Anda ambil dari buku-buku lama apak para pendukung perdagangan bebas. Kami menantang Anda untuk mengucapkan sebuah kata yang menentang kami yang tidak segera berbalik menyerang Anda dan prinsip yang memandu seluruh kebijakan Anda.

Akankah Anda mengatakan kepada kami bahwa, meskipun kami mungkin mendapatkan keuntungan dengan proteksi ini, Prancis tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali,

karena konsumen yang akan menanggung bebannya?
Kami punya jawaban:

Anda tidak lagi memiliki hak untuk merujuk pada kepentingan konsumen. Anda telah mengorbankannya kapan pun Anda menganggap kepentingannya berlawanan dengan kepentingan produsen. Anda berbuat demikian demi untuk *mendorong industri dan meningkatkan pekerjaan.* Untuk alasan yang sama Anda seharusnya melakukan hal tersebut kali ini.

Memang, Anda sendiri telah mengantisipasi keberatan ini. Ketika diberitahu bahwa konsumen memiliki kepentingan dalam bebas masuknya besi, batubara, wijen, terigu, dan tekstil, "Ya," jawab Anda, "namun produsen memiliki kepentingan dalam penyingkiran mereka." Baik, tentu saja jika para konsumen memiliki kepentingan dalam izin masuk cahaya alamiah tersebut, produsen memiliki kepentingan dalam pelarangannya.

"Tapi," Anda mungkin masih ingin berkata, "produsen dan konsumen tersebut adalah satu dan sama orangnya. Jika si pengusaha mendapat keuntungan dari proteksi, ia akan membuat si petani makmur. Sebaliknya, jika pertanian makmur, ia akan membuka pasar bagi barang-barang pabrikan." Baik!! Jika Anda memberi kami monopoli atas produksi cahaya selama siang hari, pertama-tama kami akan membeli sejumlah besar gemuk, arang, oli, damar, lilin, alkohol, perak, besi, perunggu, dan kristal, untuk memasok industri kami; dan selain itu, kami dan para pemasok kami, setelah menjadi kaya, akan banyak mengonsumsi dan menyebarluaskan kemakmuran ke seluruh wilayah industri dalam negeri.

Akankah Anda berkata bahwa cahaya matahari adalah suatu berkah cuma-cuma dari Alam, dan bahwa menolak berkah tersebut akan berarti menolak kekayaan itu sendiri dengan dalih mendorong sarana-sarana untuk mendapatkannya?

Namun jika Anda mengambil posisi ini, Anda menghantamkan pukulan mematikan pada kebijakan Anda sendiri; ingat bahwa hingga sekarang Anda selalu menyingkirkan barang-barang asing *karena* mereka kurang lebih menyerupai berkah cuma-cuma. Anda hanya memiliki *setengah* alasan yang sama baiknya untuk menuruti tuntutan-tuntutan para monopolis lain sebagaimana alasan yang Anda miliki untuk menuruti petisi kami, yang *sangat* sesuai dengan kebijakan lazim Anda; dan menolak tuntutan-tuntutan kami karena mereka *memiliki pendasaran yang lebih baik* dibanding tuntutan orang lain akan sama artinya dengan menerima persamaan: + x = + − ; dengan kata lain, hal itu akan berarti menumpuk *absurditas* di atas *absurditas*.

Kerja dan Alam bekerja sama dalam proporsi yang berbeda-beda—tergantung negeri dan iklimnya—dalam produksi sebuah komoditas. Bagian yang diberikan Alam selalu gratis; bagian yang diberikan oleh kerja manusia-lah yang membentuk nilai dan diberi bayaran.

Jika sebuah jeruk dari Lisbon dijual setengah harga sebuah jeruk dari Paris, hal ini karena panas alamiah matahari tersebut, yang tentu saja gratis, ada pada yang pertama sedangkan yang kedua harus menggunakan pemanasan buatan, yang niscaya harus dibayar di pasar.

Dengan demikian, ketika sebuah jeruk sampai pada kita dari

Portugis, seseorang dapat mengatakan bahwa ia diberikan kepada kita setengah gratis, atau, dengan kata lain, *setengah harga* dibandingkan dengan yang dari Paris.

Kini, atas dasar *kesemi-gratisannya* inilah Anda mengatakan bahwa ia harus dilarang. Anda meminta: "Bagaimana bisa pekerja Prancis bertahan terhadap persaingan tenaga kerja asing ketika yang pertama harus melakukan semua pekerjaan, sedangkan yang kedua hanya harus melakukan setengahnya, dan setengahnya lagi dilakukan oleh matahari?" Namun jika kenyataan bahwa sebuah produk *setengah* gratis menjadikan Anda menyingkirkannya dari persaingan, bagaimana bisa keadaannya yang *sepenuhnya* gratis mendorong Anda untuk membiarkannya masuk ke dalam persaingan? Atau Anda tidak konsisten, atau Anda harus, setelah menyingkirkan apa yang setengah gratis sebagai berbahaya bagi industri domestik kita, menyingkirkan apa yang sepenuhnya cuma-cuma dengan alasan yang lebih banyak dan dengan semangat dua kali lipat!

Ambil contoh yang lain: Ketika sebuah produk—batubara, besi, gandum, atau tekstil—sampai pada kita dari luar negeri, dan ketika kita dapat memperolehnya dengan kerja yang lebih sedikit ketimbang jika kita memproduksinya sendiri, perbedaan tersebut adalah *suatu berkah cuma-cuma* yang diberikan kepada kita. Ukuran berkah ini sebanding dengan tingkat perbedaan ini. Ia adalah seperempat, setengah, atau tiga perempat dari nilai produk tersebut jika si orang asing meminta dari kita hanya tiga perempat, setengah, atau seperempat harga. Ia sama menyeluruhnya dengan perbedaan ini ketika si dermawan tersebut, seperti matahari yang memberi kita cahaya, tak meminta apa-apa dari kita. Pertanyaannya, dan kami mengemukakannya secara formal, adalah apakah

apa yang Anda inginkan bagi Prancis adalah keuntungan konsumsi cuma-cuma tersebut atau keuntungan produksi yang melelahkan tersebut. Buat pilihan Anda, tapi bersikaplah logis; karena sejauh Anda melarang—sebagaimana yang Anda lakukan—batubara, besi, gandum, dan tekstil asing, secara merata hingga harga mereka mendekati *nol*, betapa tidak konsistennya jika kita membiarkan cahaya matahari, yang harganya adalah nol sepanjang hari!

Freedom Institute

BERDIRI pada akhir 2001 Freedom Institute adalah lembaga think tank yang bergerak di bidang penyemaian gagasan-gagasan tentang masyarakat merdeka. Kegiatan-kegiatannya meliputi penerjemahan dan penerbitan buku, pengadaan Perpustakaan Freedom yang terbuka untuk umum, pelatihan wartawan muda, diskusi-diskusi publik, da studi dan advokasi kebijakan publik. Pada 2006, Freedom Institute diakui secara internasional oleh Atlas Economic Research Foundation sebagai think tank yang perkembangannya "sangat menjanjikan". Mulai September 2009, Freedom Institute berkantor di Wisma Proklamasi, setelah hampir delapan tahun di Jalan Irian No. 8, juga di daerah Menteng.

Alamat
Wisma Proklamasi
Jl. Proklamasi 41, Menteng - Jakarta 10320
Tel: (021) 31909226, Fax: (021) 31909227
Website: http://www.freedom-institute.org
E-mail: office[at]freedom-institute.org

AkademiMerdeka.org

AKADEMIMERDEKA.ORG adalah bagian dari Atlas Global Initiative for Free Trade, Peace and Prosperity yang berikhtiar menyemaikan ide-ide kemerdekaan individu, hak-hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, hak-hak yang tak terhapuskan dari diri manusia. Ia menawarkan sebuah pendekatan yang berdasarkan hak asasi manusia sebagai alternatif atas berbagai ideologi koersif yang tersebar di dunia saat ini, dengan cara menunjukkan keadilan dn berbagai keuntungan praktis dari kemerdekaan individu dan pembatasan kekuasaan negara. Platform kegiatan ini menggagas, mengelola, dan mempromosikan produk-produk dan program-program dalam beberapa bahasa dan mendorong kerjasama antar lembaga sejenis yang aspirasinya sama: perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan individu, kemerdekaan berkumpul, kemerdekaan beragama, kebebasan berdagang, pembatasan kekuasaan negara, kedaulatan hukum, dan perdamaian. Media komunikasi yang digunakan meliputi terbitan buku, artikel-artikel internet, sindikasi artikel-artikel pers, pemanfaatan kreatif media baru, penyelenggaraan kelas-kelas pengajaran dan konferensi-konferensi kebijakan, dan lain-lain.

Alamat
AkademiMerdeka.org
c/o: Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS)
K3 Taman Tunku, Bukit Tunku
50480 Kuala Lumpur, Malaysia
www.IDEAS.org.my